ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK SERTA ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI KOTA YOGYAKARTA DALAM ERA OTONOMI DAERAH

SKRIPSI

Oleh:

Nama : Ginanjar Dhany Wicaksono

No. Mahasiswa : 02312146

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2006

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK SERTA ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI KOTA YOGYAKARTA DALAM ERA OTONOMI DAERAH

SKRIPSI

Oleh:

Nama : Ginanjar Dhany Wicaksono

No. Mahasiswa : 02312146

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2006

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

" Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, ... 2006

Penyusun,

Materai

(Ginanjar Dhany Wicaksono)

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK SERTA ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI KOTA YOGYAKARTA DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Hasil Penelitian

diajukan oleh:

Nama : Ginanjar Dhany Wicaksono

Nomor Mahasiswa : 02312146

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 8 Maret 2006

Dosen Pembimbing,

(Mahmudi, SE, M.Si, Ak)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Serta Analisis Kontribusi Retribusi Kota Yogyakarta Dalam Era Otonomi Daerah

Disusun Oleh: GINANJAR DHANY WICAKSONO
Nomor mahasiswa: 02312146

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan ***LULUS***
Pada tanggal : 18 April 2006

Pembimbing Skripsi/Penguji : Mahmudi, SE, M.Si, Ak

Penguji : Dra. Prapti Antarwiyati, M.Si, Ak

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Drs. Suwarsono, MA

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK SERTA ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI KOTA YOGYAKARTA DALAM ERA OTONOMI DAERAH

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Ginanjar Dhany Wicaksono

No. Mahasiswa : 02312146

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2006

HALAMAN MOTTO

"...Allah tiada membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baginya (pahala) apa yang dia kerjakan dan dia mendapat (siksa dari kejahatan) yang dia kerjakan..."

(Al Baqarah Ayat 286)

"...Supaya kamu jangan putus asa atas sesuatu yang luput daripada kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira dengan apa yang telah diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri..."

(Al Hadiid Ayat 23)

"...Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat..."

(Al Mujaadilah Ayat 11)

"...Sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah (urusan yang lain) dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap..."

(Al Insyiraah Ayat 6-8)

I'm not the best, but I always try to do my best in my life.

HALAMAN PERSEMBAHAN

MARET, 2006

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK:

- Papa dan Mama tersayang, yang selalu mendoakan, mendorong, dan membimbing penulis.
- Erwin, adikku tercinta satu-satunya, atas doa yang diberikan.
- Seluruh sanak saudara yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan moril untuk tetap berusaha.
- Wiwied, atas doa dan dorongan semangat yang diberikan pada penulis.
- Yang selalu membantu dan mendoakan penulis untuk selalu sukses.

KATA PENGANTAR

Bismillahhirrahmanirraahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dan berkat petunjuk-Nya kepada penulis, maka tersusunlah skripsi ini dengan judul "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak serta Analisis Kontribusi Retribusi Kota Yogyakarta dalam Era Otonomi Daerah".

Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu pada Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dari yang diharapkan. Dan tak akan lepas dari kekurangan maupun kekeliruan disebabkan oleh pengetahuan penulis yang masih terbatas.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Drs. H. Suwarsono, MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Mahmudi, SE, M.Si, Ak., selaku Dosen Pembimbing yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan kebaikan Bapak, dan maaf apabila penulis ada kesalahan selama bimbingan.
3. Pihak Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk mengumpulkan data yang penulis perlukan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Papa dan Mama tersayang, yang selalu mendoakan, mendorong, membimbing dan memberikan semua yang penulis butuhkan.
5. Erwin, adikku tercinta satu-satunya, atas doa yang diberikan.
6. Seluruh sanak saudara yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan moril untuk tetap berusaha.
7. Widyarin Kusumaningtyas (Wiwied), atas doa dan dorongan semangat yang diberikan pada penulis.
8. Rekan-rekan yang telah memberikan dorongan serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dimana telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan karena terbatasnya kemampuan, sehingga saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri, ilmu pengetahuan serta pihak-pihak yang memerlukan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....iii

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN.....iv

HALAMAN MOTTO.....v

HALAMAN PERSEMBAHAN.....vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....ix

DAFTAR TABEL.....xii

DAFTAR LAMPIRAN.....xiv

ABSTRAK.....xv

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang Masalah.....1

1.2. Rumusan Masalah Penelitian.....5

1.3. Batasan Masalah.....6

1.4. Tujuan Penelitian.....6

1.5. Manfaat Penelitian.....6

1.6. Sistematika Penelitian.....7

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....9

2.1. Pengertian Pajak.....9

2.1.1. Sejarah Perkembangan Pajak.....11

2.1.2. Fungsi Pajak.....10

2.1.3. Kriteria Pajak.....15

2.1.4. Justifikasi Pemungutan Pajak.....15

2.2. Penggolongan dan Jenis Pajak.....17

2.3. Retribusi.....18

2.4. Penggolongan dan Jenis Retribusi.....18

2.5. Otonomi Daerah.....21

2.6. Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak.....24

2.7. Penelitian Terdahulu.....25

BAB III METODE PENELITIAN.....27

3.1. Data Penelitian.....27

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....27

3.3. Metode Analisis Data.....28

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....33

4.1. Analisis Struktur Penerimaan Kota Yogyakarta.....33

4.2. Analisis Struktur Hubungan

Pemerintah Pusat dan Daerah.....35

4.3. Analisis Kinerja Efisiensi dan

Efektivitas Penerimaan PAD.....37

4.3.1. Analisis Efektivitas.....37

4.3.2. Analisis Efisiensi.....39

4.4. Komposisi dan Pertumbuhan Pajak.....40

4.4.1. Komposisi Pajak.....40

4.4.2. Pertumbuhan Pajak.....40

4.5. Komposisi dan Pertumbuhan Retribusi.....41

4.5.1. Komposisi Retribusi.....41

4.5.2. Pertumbuhan Retribusi.....42

4.6. Klasifikasi Pajak dan Retribusi.....43

4.6.1. Klasifikasi Pajak.....45

4.6.2. Klasifikasi Retribusi.....45

BAB V PENUTUP.....47

5.1. Simpulan.....47

5.2. Saran.....49

5.3. Keterbatasan Penelitian.....49

REFERENSI.....50

LAMPIRAN.....53

DAFTAR TABEL

Tabel Hal

4.1. Sumber-sumber Penerimaan Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004.....34

4.2. Kontribusi Sumber-sumber Penerimaan Kota Yogyakarta Terhadap Total Penerimaan Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004.....35

4.3. Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004.....36

4.4. Kemandirian, Kemampuan Keuangan dan Pola Hubungan Pusat-Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004 37

4.5. Tingkat Efektivitas Penerimaan PAD di Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004.....38

4.6. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004.....38

4.7. Tingkat Efisiensi Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004.....39

4.8. Komposisi Jenis Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004.....40

4.9. Pertumbuhan Penerimaan Jenis-jenis Pajak Daerah Tahun 2001-2004.....41

4.10. Komposisi Jenis Retribusi terhadap Penerimaan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004.....42

4.11. Pertumbuhan Penerimaan Jenis-jenis Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004.....43

4.12. Klasifikasi Jenis-jenis Pajak Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004.....45

4.13. Klasifikasi Jenis-jenis Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2001-2004.....46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Hal

1. Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli daerah TA. 2000/2001 Kota Yogyakarta.....53
2. Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli daerah Tahun Anggaran 2002 s/d 2004 Kota Yogyakarta.....56
3. Laporan Belanja Rutin Tahun 2001 Kota Yogyakarta.....62
4. Laporan Belanja Rutin Tahun 2002 Kota Yogyakarta 64
5. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Belanja Operasi dan Pemeliharaan Tahun 2003 KPPD Kota Yogyakarta.....65
6. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Belanja Operasi dan Pemeliharaan Tahun 2004 KPPD Kota Yogyakarta.....71
7. Surat Ijin Penelitian.....77

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas serta efisiensi pajak dan kontribusi retribusi kota Yogyakarta dalam era otonomi daerah. Permasalahan yang akan dibahas adalah apakah pemerintah kota Yogyakarta selama otonomi daerah sudah mengelola pajak secara efektif dan efisien serta kontribusi dari retribusi bagi pendapatan daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan sumber-sumber penerimaan kota Yogyakarta, laporan realisasi pendapatan daerah kota Yogyakarta, laporan penerimaan PAD kota Yogyakarta, serta laporan penerimaan pajak dan retribusi daerah kota Yogyakarta, maupun peraturan-peraturan yang menyangkut penerimaan pajak dan retribusi antara tahun 2001 sampai dengan 2004 pada pemerintah kota Yogyakarta.

Metode analisis data dalam penelitian ini digunakan beberapa alat analisis, metode kuantitatif dan deskriptif analitis, yaitu untuk mengetahui keadaan obyek pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan PAD di kota Yogyakarta dalam mendukung APBD masih rendah, dengan demikian RAPBD Kota Yogyakarta belum didukung oleh kemandirian daerah secara fiskal. Namun penerimaan PAD terutama pajak cenderung efektif atau penerimaan melebihi target yang ditetapkan. Disamping itu dalam penerimaan pajak daerah juga cenderung efisien. Dalam hal ini berarti biaya pemungutan pajak yang mengalami penurunan terhadap realisasi pajak daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 1974 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 lebih banyak menitikberatkan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dibandingkan yang desentralistik, karena itu Undang-undang No 5 Tahun 1974 lebih dapat dirasakan sebagai undang-undang birokrasi daripada undang-undang desentralisasi. Oleh karena itu dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah merupakan upaya mereformasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut.

Otonomi daerah secara serentak telah dilaksanakan mulai Januari 2001. Dalam tahap awal pelaksanaan otonomi daerah, masih ada beberapa daerah yang merasa belum siap, namun sebagian sudah siap melaksanakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah secara tidak langsung akan memaksa daerah untuk melakukan perubahan-perubahan baik perubahan struktur maupun perubahan proses birokrasi dan kultur birokrasi. Perubahan struktur meliputi pembaharuan yang sifatnya kelembagaan (*institutional reform*), yaitu

pembenahan struktur birokrasi pemerintah daerah yang lebih ramping akan tetapi kaya fungsi (*form follow function*). Perubahan proses meliputi perubahan yang menyentuh keseluruhan aspek dalam siklus pengendalian manajemen di pemerintah daerah, yaitu perumusan strategi, perencanaan strategis, penganggaran, pelaporan kinerja, penilaian kinerja, dan mekanisme reward & punishment system. Perubahan kultur birokrasi terkait dengan perubahan budaya kerja dan perilaku pegawai yang mengarah pada terciptanya profesionalisme birokrasi (Mardiasmo, 2001).

Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004). Membicarakan otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dengan adanya pembagian kekuasaan di dalam suatu negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip dasar desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam undang-undang ini daerah kabupaten dan daerah kota berfungsi sebagai daerah otonom dengan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Dan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Adapun prinsip-prinsip otonomi daerah adalah (Setiawan, 1999):

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara, sehingga tetap terjamin hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan

perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah pusat kepada daerah, namun juga dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama di kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Agar lebih siap melaksanakan otonomi daerah, perlu proses pembelajaran bagi masing-masing daerah agar dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan masing-masing daerah. Demikian pula dengan pemerintah pusat, sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah, bertanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling berwenang dalam mengatur daerahnya. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi.

Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah akan semakin berperan dan semakin penting. Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Sumber PAD yang berasal dari pajak dan retribusi daerah masih terbuka luas untuk dikembangkan. Di kebanyakan daerah, PAD hanya menyumbang 10-30 persen dari penerimaan APBD kota/kabupaten, hanya beberapa kota/kabupaten saja yang memiliki PAD lebih dari 50 persen (Halim, 2000). Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang mampu mendayagunakan potensi daerah dalam membangun daerahnya sendiri.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah akan semakin berperan dan semakin penting dalam era otonomi daerah. Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-

sumber keuangan daerah. Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Dalam hal ini pajak dan retribusi daerah merupakan sumber PAD yang masih terbuka untuk dikembangkan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis apakah pemerintah kota Yogyakarta selama otonomi daerah sudah mengelola pajak secara efektif dan efisien serta kontribusi dari retribusi bagi pendapatan daerah.

1.3 Batasan Masalah

Analisis yang dilakukan akan dibatasi menyangkut efisiensi dan efektivitas pajak dan kontribusi retribusi daerah selama era otonomi daerah, yaitu antara tahun 2001 sampai dengan 2004 pada pemerintah kota Yogyakarta.

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis tentang efisiensi dan efektivitas pajak serta kontribusi retribusi daerah di kota Yogyakarta.
2. Mengamati perubahan serta perkembangan pajak dan retribusi daerah selama era otonomi daerah.

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengukur efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak dan kontribusi dari retribusi daerah sebagai komponen pendapatan daerah.
2. Mengetahui keadaan dan perkembangan pajak daerah dan retribusi selama era otonomi daerah.
3. Untuk kepentingan akademis, yaitu sebagai bahan referensi tambahan bagi usaha penelitian sejenis di masa-masa yang akan datang.
4. Sebagai bahan masukan terhadap ilmu akuntansi terutama akuntansi pemerintahan serta perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bab dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Materi pokok dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab Pendahuluan merupakan bagian awal dari penulisan yang menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan serta masalah penelitian.

Bab II. Kajian Pustaka

Dalam bab kajian Pustaka akan dijelaskan teori yang melandasi penelitian ini yaitu: pengertian-pengertian yang ada kaitannya

dengan perpajakan, pengertian pajak, serta pengertian retribusi. Kriteria pajak, macam-macam pajak, dan jenis-jenis retribusi.

Bab III. Metode Penelitian

Dalam bab Metode Penelitian akan diuraikan mengenai data penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV. Analisis dan Pembahasan

Bab Analisis dan Pembahasan berisi tentang inti dari penyusunan skripsi, karena disini penulis akan menguraikan hasil pengamatan dan penelitian penulis yang hasilnya dapat dilihat dari analisa yang penulis lakukan.

Bab V. Simpulan, Saran dan Keterbatasan Penelitian

Bab V akan diuraikan memgenai simpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Ada banyak pendapat yang mengemukakan tentang pengertian pajak, antara lain:

- Menurut C.F. Bastable (1993) dalam bukunya yang berjudul *Public Finance*, menyatakan bahwa pajak adalah: *a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers.*
- Menurut H.C Adams (1898) dalam bukunya *The Science of Finance* merumuskan pajak sebagai: *a contribution from the citizens to the support of the state.*
- Menurut Edwin Robert Anderson Seligman (1925) dalam bukunya *Essays on Taxation* merumuskan pajak sebagai: *a tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred.*
- Prof. Dr. P.J.A. Andriani (1989) menyatakan, bahwa pajak adalah: iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

- Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH (1979) dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan merumuskan: pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
- Menurut Ray M. Sommerfeld dan kawan-kawan (1983) dalam bukunya *An Introduction to Taxation* merumuskan pajak sebagai: *Any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation's economic and social objectives.*

Sementara pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Propinsi, Kabupaten, Kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Sedangkan menurut

UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh seorang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

2.1.1 Sejarah Perkembangan Perpajakan

Eksistensi pajak sebagai pungutan telah ada sejak zaman Romawi. Pada awal Republik Roma (509-27 Sebelum Masehi) dikenal beberapa jenis pungutan seperti *censor, questor* dan beberapa jenis pungutan lain. Pelaksanaan pemungutannya diserahkan kepada warga tertentu yang disebut *publican. Tributum* sebagai pajak langsung (pajak atas kepala = *head tax*) dipungut pada zaman perang terhadap penduduk Roma sampai tahun 167 SM. Sesudah abad ke-2 penguasa Roma mengandalkan pajak tidak langsung yang disebut *vegtigalia* seperti *portoria* yaitu pungutan atas penggunaan pelabuhan.

Di zaman Julius Caesar dikenal *centesima rerum venalium* yakni sejenis pajak penjualan dengan tarif 1% dari omzet penjualan. Di daerah lain di Italia dikenal *decumae*, yakni pungutan sebesar 10% (*tithe*) dari para petani atau penguasa tanah. Setiap penduduk di Italia, termasuk penduduk Roma sendiri dikenakan *tributum* yang tetap, yang sering disebut juga *stipendium*.

Demikian pula di Mesir, pembuatan piramida yang tadinya merupakan pengabdian dan bersifat sukarela dari rakyat Mesir, pada akhirnya menjadi paksaan, bukan saja dalam bentuk uang, harta kekayaan, tetapi juga dalam bentuk kerja paksa.

Pada abad ke-14 di Spanyol dikenal *alcabala*, salah satu bentuk pajak penjualan. Di Indonesia, berbagai pungutan baik dalam bentuk natura (*payment in kind*), kerja paksa maupun dengan uang dan upeti telah lama dikenal. Pungutan dan beban rakyat Indonesia semakin terasa besarnya, terutama sesudah berdirinya VOC tahun 1602, dan dilanjutkan dengan pemerintah kolonial Belanda. Pada zaman Raffles (1813) dikenal pajak bumi (*land rent*) dan pajak atas rumah.

Pajak pada mulanya dibayar secara natura, seperti dengan gandum, padi, logam mulia, emas dan perak. Bagi penduduk yang tidak mampu pembayarannya dilakukan dengan tenaga, yang antara lain berekses dengan timbulnya perbudakan.

Dewasa ini pada umumnya pajak telah dibayar dengan uang, walaupun di beberapa negara masih terlihat "pemaksaan pembayaran dengan tenaga", dalam bentuk wajib militer.

Berbagai pungutan dari penduduk dan segala bentuk variasinya serta penggunaan pungutan itu untuk berbagai tujuan telah sama tuanya dengan umur timbulnya negara. Akan tetapi usaha-usaha untuk memberi dasar atau prinsip-prinsip pemungutannya menjadi "pajak", baru mulai lahir pada akhir

zaman merkantilisme di Eropa dan timbulnya Revolusi Industri di Inggris, yakni pada awal abad ke-18.

2.1.2 Fungsi Pajak

Secara umum dikenal 2 macam fungsi pajak yang diuraikan oleh Nurmantu (2003) yaitu:

1. Fungsi Pajak Budgetair

   Fungsi budgetair disebut fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*) yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya.

2. Fungsi Pajak Regulerend

   Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgetair. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan.

Neumark (1974) dalam *The New Encyclopaedia Britanica* mengemukakan fungsi pajak dalam rumusan lain, yakni:

1. *Fiscal or budgetary function*

Pengertian fungsi pajak disini adalah bahwa manfaat dan eksistensi pajak adalah untuk menutup pengeluaran-pengeluaran pemerintah sedemikian rupa, yakni untuk pos-pos pengeluaran yang tidak dibiayai dengan pos-pos tertentu seperti dari laba perusahaan pemerintah, pencetakan uang baru dan obligasi.

2. *Economic function*

Pengertian fungsi pajak di sini adalah bahwa manfaat dan eksistensi pajak adalah untuk menggalakkan tujuan-tujuan umum pemerintah seperti mencegah pengangguran, kestabilan moneter, dan pertumbuhan ekonomi.

3. *Social function*

Pengertian fungsi pajak di sini adalah bahwa manfaat dan eksistensi pajak adalah berperan sebagai alat untuk pemerataan, yakni untuk memperkecil perbedaan pendapat dan kekayaan yang tidak merata di antara penduduk suatu negara.

Selanjutnya menurut Rolph (1986) dalam *International Ecyclopedia of the Social Sciences* ada beberapa fungsi pajak (*function of taxation*) yang terdiri dari fungsi:

1. *Revenue*

Pajak berfungsi di satu pihak mengurangi potensi kemampuan bayar Wajib Pajak, tetapi di lain pihak menaikkan kemampuan bayar pemerintah sebagai pemungut pajak.

2. *Resource reallocation*

Keberadaan pajak dapat merubah perilaku konsumen, dapat mendorong kegiatan atau sebaliknya dapat menghambat kegiatan tertentu.

3. *Income redistribution*

Dengan adanya pajak, khususnya melalui tarif pajak yang progresif, maka penghasilan yang diterima secara berlebih-lebihan oleh elite penduduk tertentu akan dikenakan tarif pajak penghasilan yang tinggi, yang hasilnya dapat dipergunakan untuk membantu penduduk yang miskin.

2.1.3 Kriteria Pajak

Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh Davey (1988) dalam buku *Financing Regional Government* terdiri dari 4 (empat) hal yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan daerah sendiri
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

2.1.4 Justifikasi Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak juga terdapat teori pemungutan pajak yang berguna untuk memberi dasar menyatakan keadilan (*justification*) kepada hak negara

untuk memungut pajak dari rakyatnya. Teori pemungutan pajak yang pernah ada atau yang masih digunakan sebagai dasar pemungutan pajak sampai sekarang antara lain:

a. Teori Asuransi

Menurut teori asuransi, fiskus berhak memungut pajak dari penduduk, karena negara dianggap identik dengan perusahaan asuransi, dan Wajib Pajak adalah tertanggung yang wajib membayar premi dalam hal ini pajak. Negara yang berhak memungut pajak itu, menurut teori ini, melindungi segenap rakyatnya. Namun teori ini mempunyai kelemahan, antara lain tidak adanya imbalan yang akan diberikan negara jika tertanggung dalam hal ini Wajib Pajak menderita risiko.

b. Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan, bahwa negara berhak memungut pajak dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan kepada negara.

Teori ini mempunyai kelemahan antara lain tentang fungsi negara untuk melindungi segenap rakyatnya. Negara tidak boleh memilih dalam melindungi penduduknya.

Di samping itu jika ditinjau dari unsur definisi pajak, maka adanya hubungan langsung atau kontra prestasi telah menggugurkan eksistensi pajak itu sendiri.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari Wajib Pajak. Jadi Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya.

d. Teori Bakti

Teori bakti mengajarkan, bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara. Penduduk terikat pada keberadaan negara, karenanya penduduk wajib membayar pajak, wajib berbakti kepada negara.

e. Teori Asas Daya Beli

Menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada efek atau akibat pemungutan pajak. Di hampir seluruh negara pemungutan pajak membawa efek atau akibat yang positif.

f. Teori Pembangunan

Untuk Indonesia justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan. Pajak dipergunakan untuk pembangunan, sehingga dapatlah dikatakan adanya suatu "teori pembangunan" dalam pemungutan pajak.

2.2 Penggolongan dan Jenis Pajak

Pajak Daerah termasuk klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutnya, yaitu pihak yang berwenang dan berhak memungut pajak daerah baik pemerintah daerah tingkat propinsi maupun pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak Kabupaten/Kota yang berlaku sampai saat ini sesuai

UU No.34/2000, tentang perubahan UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat 2 terdiri dari:

a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan jalan
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

2.3 Retribusi

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan. Dalam hal ini ada kekecualian tertentu, yaitu pembayaran yang dipungut oleh daerah sebagai pembayaran yang dipungut oleh daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha yang dianggap sebagai perusahaan tidak dimaksudkan sebagai retribusi daerah.

2.4 Penggolongan dan Jenis Retribusi

Retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemenintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
   a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
   b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
   c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
   d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
   e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
   f. Retribusi Pelayanan Pasar;
   g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
   h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
   i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
   j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
   a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
   b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
   c. Retribusi Tempat Pelelangan;
   d. Retribusi Terminal;

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

g. Retribusi Penyedotan Kakus;

h. Retribusi Rumah Potong Hewan;

i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;

j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;

l. Retribusi Pengolahan Limbah cair;

m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

2. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

c. Retribusi Izin Gangguan;

d. Retribusi Izin Trayek.

2.5 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah suatu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999). Membicarakan otonomi daerah tidak bias dilepaskan dengan adanya pembagian kekuasaan di dalam suatu negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip dasar otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ini adalah mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi dengan adanya kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan adanya pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Di dalam undang-undang ini daerah kabupaten dan daerah kota berfungsi sebagai daerah otonom dengan kewenangan untuk menjalankan kebijaksanaan menurut prakarsa aspirasi masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip otonomi daerah adalah (Setiawan, 1999):

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara, sehingga tetap terjamin hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah pusat kepada daerah, namun juga dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta

sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama di kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Agar lebih siap melaksanakan otonomi daerah, perlu proses pembelajaran bagi masing-masing daerah agar dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan masing-masing daerah. Demikian pula dengan pemerintah pusat, sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah, bertanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling berwenang dalam mengatur daerahnya. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi.

Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah akan semakin berperan dan semakin penting. Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Sedangkan kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Sumber PAD yang berasal dari pajak dan retribusi daerah masih terbuka luas untuk dikembangkan. Di

kebanyakan daerah, PAD hanya menyumbang 10-30 persen dari penerimaan APBD kota/kabupaten, hanya beberapa kota/kabupaten saja yang memiliki PAD lebih dari 50 persen (Halim, 2000). Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang mampu mendayagunakan potensi daerah dalam membangun daerahnya sendiri.

2.6 Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapat asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan secara cermat karena meskipun pemerintah daerah mampu merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu akan kurang memiliki arti jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Soeratno dan Yunasman (2002) melakukan penelitian mengenai kemampuan keuangan daerah Kabupaten Solok. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat beberapa rasio yang menunjukkan adanya kondisi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Trend atau kecenderungan rasio pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan terhadap total pendapatan daerah serta rasio pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang menunjukkan dari aspek keuangan daerah, kabupaten Solok belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

Prawirosetoto (2002) melakukan penelitian mengenai desentralisasi fiskal di Indonesia. Penelitian Prawirosetoto tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan langkah strategis menuju era perdagangan bebas serta akan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian secara makro. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia harus

mampu memasuki masyarakat dunia yang sedang bersama-sama meningkatkan daya saing negara. Untuk itu, harus diberlakukan pemberdayaan birokrasi (*reinventing government*) yang merupakan salah satu prinsip di dalam pemberdayaan birokrasi, yaitu pemerintahan yang terdesentralisasikan (*decentralized government*). Desentralisasi fiskal merupakan wujud nyata dari pemerintahan yang terdesentralisasi. Artinya, dengan penerapan desentralisasi fiskal ini diharapkan masyarakat dapat belajar bagaimana masyarakat diberi kebebasan untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi daerah untuk kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi warga.

Nuryadin (2004) melakukan penelitian tentang analisis potensi pajak dan retribusi daerah. Hasil dari penelitian Nuryadin menyatakan perlunya penetapan target pajak dan retribusi pemerintah Kota untuk mencapai penerimaan PAD yang cenderung efektif atau penerimaan melebihi target yang ditetapkan. Efektifitas tiap jenis pajak dan retribusi maupun elastisitas pajak dan retribusi yang positif.

Ansar (2005) melakukan penelitian tentang strategi pengolahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pajak dan retribusi daerah dalam pelaksanaan otonomi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke. Hasil dari penelitian ini adalah dibutuhkannya upaya dan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk meningkatkan dengan menata sistem pengelolaan pendapatan daerah terutama sektor pajak dan retribusi daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan sumber-sumber penerimaan kota Yogyakarta, laporan realisasi pendapatan daerah kota Yogyakarta, laporan penerimaan PAD Kota Yogyakarta serta laporan penerimaan pajak dan retribusi daerah kota Yogyakarta, maupun peraturan-peraturan yang menyangkut penerimaan pajak dan retribusi kota Yogyakarta.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk keperluan penulisan penelitian ini berasal dari Badan/Lembaga/Instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun sumber data tersebut berasal dari:

1. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Yogyakarta.
2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kota Yogyakarta.
3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta.
4. Bagian Perekonomian dan PAD Kota Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan

   Penelitian lapangan dilaksanakan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data, informasi atau keterangan lain yang diperlukan.

2. Studi kepustakaan

   Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mengutip, baik secara langsung maupun tidak langsung dari literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan penelitian.

3.3 Metode Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan beberapa alat analisis, metode kuantitatif dan deskriptif analitis, yaitu untuk mengetahui keadaan obyek pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, antara lain:

1. Analisis Struktur Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Struktur hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dapat diketahui dengan menggunakan indikator derajat desentralisasi fiskal (DDF). DDF antara pemerintah pusat-daerah dapat dihitung dengan mengukur rasio antara PAD (dan komponennya) terhadap total penerimaan daerah (TPD). Sebagai perbandingan akan dianalisis derajat desentralisasi fiskal perpajakan daerah

yaitu persentase bagi hasil pajak pusat dan bukan pajak untuk daerah terhadap TPD. Kemudian persentase sumbangan dan bantuan pemerintah pusat terhadap TPD.

Derajat desentralisasi fiskal dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$DD = \frac{PAD}{TPD} X100\% \ : DDP \ \frac{PPD}{TPD} X100\% \ : S = \frac{T}{TPD} X100\%$$

Keterangan:

DD = Nilai derajat desentralisasi fiskal

PAD = PAD

TPD = Total Penerimaan Daerah

PPD = Penerimaan Pajak Daerah

DDP = Desentralisasi Perpajakan Derah

BHP = Bagi hasil pajak dan bukan pajak

S = Subsidi atau Bantuan yang diterima pemerintah daerah

T = Penerimaan transfer pemerintah pusat dan daerah

2. Analisis Kinerja

Menurut Devas (2001), tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja administrasi penerimaan daerah yaitu:

a. Analisis Efektivitas

Analisis Efektivitas mengukur hubungan antara realisasi PAD terhadap potensi PAD. Data potensi PAD diproxi dengan data target PAD. Apabila nilai rasionya sama dengan atau lebih dari 100%, maka dikatakan bahwa

obyek pendapatan yang diteliti telah bekerja secara efektif. Formulasi efektivitas tersebut adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Potensi PAD}} \text{x}100\% \quad \ldots(\text{i})$$

Dengan formulasi nomor (i) untuk mengukur efektivitas, maka untuk mengukur efektivitas pajak dilakukan dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Potensi Pajak}} \text{x}100\% \quad \ldots(\text{ii})$$

b. Analisis Efisiensi

Analisis Efisiensi digunakan untuk menilai efisiensi sumber-sumber penerimaan daerah, untuk membantu menetapkan sasaran-sasaran yang penting. Sasaran-sasaran penting itu adalah:

(i) Usaha peningkatan PAD yang lebih realistis dengan mengurangi biaya-biaya pemungutan, diharapkan sumber pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan sumber yang bersangkutan.

(ii) Meningkatkan kemampuan dan pemantauan serta pengawasan secara lebih efektif dan efisien terhadap anggaran biaya operasional dan pemeliharaan yang digunakan dalam pengelolaan jasa PAD.

(iii) Meningkatkan PAD sendiri seutuhnya dalam mendanai program-program investasi pembangunan daerah.

Pencapaian ketiga sasaran tersebut akan berdampak positif pada penerimaan, antara lain dapat meningkatkan tanggung jawab moril aparat

pelaksana dan memberikan dukungan terhadap program-program pembangunan karena dengan analisis efisiensi ini dapat diketahui bagaimana *performance* dari sumber penerimaan tersebut.

Formulasi efisiensi yang digunakan dalan penelitian ini adalah:

$$\text{Efisiensi} : \frac{\text{Biaya PemungutanPAD}}{\text{Realisasi PAD}} \text{x} 100\% \quad \ldots(\text{iii})$$

Dengan formulasi nomor (iii) untuk mengukur efisiensi, maka untuk mengukur efisiensi pajak dilakukan dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Pajak:} \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}} \text{x} 100\% \quad \ldots(\text{iv})$$

3. Klasifikasi Pajak dan Retribusi

Untuk mengetahui klasifikasi jenis pajak dan retribusi daerah diperlukan identifikasi atau klasifikasi kondisi yang didasarkan pada jumlah serta perkembangan tiap jenis sumber PAD. Identifikasi ini dilakukan dengan cara mematrikkan antara komposisi penerimaan dan pertumbuhan penerimaan.

a. Komposisi Penerimaan

Komposisi Penerimaan adalah total hasil tiap jenis atau komponen sumber pajak atau retribusi terhadap rata-rata hasil penerimaan seluruhnya.

b. Pertumbuhan Penerimaan

Pertumbuhan Penerimaan adalah kenaikan hasil (perubahan penerimaan) tiap komponen atau jenis sumber penerimaan pajak atau retribusi daerah terhadap kenaikan atau pertumbuhan penerimaan pajak atau retribusi seluruhnya. Berikut tabel mengenai klasifikasi pajak dan retribusi:

Klasifikasi Pajak dan Retribusi

komposisi / Pertumbuhan	$\frac{X_i}{X} \geq 1$: (Tinggi)	$\frac{X_i}{X} < 1$: (Rendah)
$\frac{dx_i}{dx} \geq 1$; (Tinggi)	Prima	Berkembang
$\frac{dx_i}{dx} < 1$; (Rendah)	Potensial	Terbelakang

Keterangan:

dx_i: Pertumbuhan tiap jenis pajak atau retribusi

dx : Pertumbuhan seluruh penerimaan pajak/retribusi

X_i : Total hasil tiap jenis pajak/retribusi

X : Rata-rata seluruh penerimaan pajak/retribusi

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Struktur Penerimaan Kota Yogyakarta

Sebagai perwujudan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah dalam hal meningkatkan dan mengembangkan kemampuan daerah di bidang keuangan. Maka pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam membiayai urusan rumah tangganya, dengan cara: *Pertama* menggali sumber-sumber dana potensial yang ada di daerah sehingga mampu meningkatkan PAD. *Kedua,* meningkatkan efisiensi sumberdaya yang terbatas; serta meningkatkan efektivitas pemungutan. Jadi, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemandiriannya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

Ukuran tingkat kemandirian Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dapat dilihat dari struktur penerimaan daerah. Sumber utama penerimaan Kota Yogyakarta yang digunakan membiayai belanja daerah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu PAD, dan pendapatan dari provinsi serta dana dari pemerintah pusat (dana perimbangan).

Dari tabel 4.2. diketahui bahwa, peranan PAD dalam mendukung APBD masih rendah (antara 10 hingga 20 persen), bahkan sempat mengalami penurunan pada tahun 2003. Dengan demikian RAPBD Kota Yogyakarta belum didukung oleh kemandirian daerah secara financial. Karena itu usaha

untuk meningkatkan kemandirian masih akan dihadapi oleh pemerintah Kota Yogyakarta pada periode mendatang.

Dilihat dari struktur PAD, diketahui bahwa pajak dan retribusi daerah mempunyai proporsi yang berubah secara bersamaan. Keduanya mengalami kenaikan dan penurunan dengan serentak. Proporsi keduanya mengalami penurunan pada tahun 2003, sedangkan proporsi bagian laba usaha daerah mengalami penurunan pada tahun 2002. Sementara pendapatan lain-lain proporsinya semakin besar dari tahun ke tahun dan mengalami penurunan pada tahun 2004.

Tabel 4.1. Sumber-sumber Penerimaan Kota Yogyakarta Tahun 2001 – 2004

Pos	2001	2002	2003	2004
Pend, Asli Daerah	40,352,592,890	56,377,459,399	68,621,564,311	79,911,419,100
Pajak Daerah	22,886,374,633	30,517,591,845	33,526,514,268	40,581,212,256
Retribusi Daerah	11,773,895,343	14,193,457,159	16,093,220,398	18,995,046,383
Bagian Laba Usaha Daerah	2,249,570,025	2,509,234,853	4,081,649,389	5,285,786,650
Lain-lain Penerimaan	3,442,752,889	9,157,175,542	14,920,180,256	15,048,605,811
Dana Perimbangan	167,269,506,353	187,968,763,862	253,512,731,343	269,967,630,201
Bagi Hasil Pajak	32,634,378,613	24,744,094,790	31,855,929,646	37,517,931,075
Bagi Hasil Bukan Pajak	483,655,406	350,156,572	444,801,682	371,509,539
DAU	113,437,221,225	162,874,512,500	196,100,000,000	197,787,000,000
Bantuan Pembangunan/DAK	20,714,251,109	-	4,200,000,000	5,500,000,000
Penerimaan Lainnya	-	-	-	-
Bagi hasil Pajak dan Bantuan	-	-	20,912,000,015	28,791,189,587
Total Penerimaan	207,622,099,243	244,346,223,261	322,134,295,654	349,879,049,301

Sumber: Bagian Perekonomian dan PAD Kota Yogyakarta

Tabel 4.2. Kontribusi Sumber-sumber Penerimaan Kota Yogyakarta Terhadap Total Penerimaan Kota Yogyakarta Tahun 2001 – 2004

Pos	2001	2002	2003	2004
Pend, Asli Daerah	19,43	23,07	21,30	22,84
Pajak Daerah	11,02	12,49	10,40	11,60
Retribusi Daerah	5,67	5,80	5,00	5,43
Bagian Laba Usaha Daerah	1,08	1,03	1,27	1,51
Lain-lain Penerimaan	1,66	3,75	4,63	4,30
Dana Perimbangan	80,57	76,93	78,70	77,16
Bagi Hasil Pajak	15,72	10,13	9,89	10,72
Bagi Hasil Bukan Pajak	0,23	0,14	0,14	0,11
DAU	54,64	66,66	60,88	56,53
Bantuan Pembangunan/DAK	9,98	-	1,30	1,57
Penerimaan Lainnya	-	-	-	-
Bagi Hasil Pajak dan Bantuan	-	-	6,49	8,23
Total Penerimaan	100	100	100	100

Sumber: Bagian Perekonomian dan PAD Kota Yogyakarta, data diolah

4.2 Analisis Struktur Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Struktur hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dapat diketahui dengan menggunakan indikator derajat desentralisasi fiskal (DDF). Derajat desentralisasi fiskal dapat digunakan sebagai indikator kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan.

Pelaksanaan desentralisasi dalam hubungannya dengan tingkat kemandirian daerah akan membawa konsekuensi terhadap posisi kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan dan pembiayaan penyelenggaraan pembangunan di daerah. Karena itu untuk menilai kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya, terutama dalam hal keuangan daerah, dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal.

Derajat desentralisasi fiskal diukur dengan membandingkan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah, rasio penerimaan transfer pemerintah pusat dan daerah terhadap total penerimaan daerah, dan rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan daerah. Derajat desentralisasi fiskal Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001 - 2004

Tahun	DD=PAD/TPD	DD=BHP/TPD	S=T/TPD
2001	19,43	15,91	80,57
2002	23,07	10,27	76,93
2003	21,30	10,03	78,70
2004	22,84	10,83	77,16

Sumber: Bagian Perekonomian dan PAD Kota Yogyakarta, data diolah

Dari tabel 4.3., terlihat bahwa rasio PAD terhadap TPD Kota Yogyakarta masih relatif kecil (antara 19 – 23 persen). Rasio terendah terjadi pada tahun 2001, kemudian terus mengalami perubahan, sehingga pada tahun 2004 menjadi sebesar 22 persen. Selama periode 2001 sampai 2004, tampak bahwa besarnya PAD masih sangat jauh dari kebutuhan pembiayaan pembangunan. Ini berarti derajat desentralisasi fiskal Kota Yogyakarta masih relatif rendah, dengan demikian tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih relatif rendah.

Ketergantungan pembiayaan Kota Yogyakarta terhadap pusat dapat dilihat dari rasio bagi hasil pajak dan non pajak terhadap total penerimaan daerah. Dilihat dari derajat desentralisasi perpajakan (rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak) nilainya berkisar antara 10 – 15 persen dan cenderung

menurun. Sementara, jika dilihat dari rasio sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat terhadap penerimaan daerah, terlihat bahwa ketergantungan keuangan pemerintah Kota Yogyakarta masih besar, rata-rata 70 persen.

Tabel 4.4. Kemandirian, Kemampuan Keuangan dan Pola Hubungan Pusat – Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001 - 2004

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Pinjaman	Kemandirian
2001	40,352,592,890	167,269,506,353	0	24,08
2002	56,377,459,399	187,968,763,862	0	29,99
2003	68,621,564,311	253,512,731,343	0	27,07
2004	79,911,419,100	269,967,630,201	0	29,60

Sumber: Bagian Perekonomian dan PAD Kota Yogyakarta, data diolah

Pada tabel 4.4. terlihat bahwa dari segi PAD dan Dana Perimbangan, kondisi kemampuan keuangan mengalami rasio kemandirian terendah pada tahun 2001 sebesar 24 persen, kemudian terus mengalami perubahan, sehingga pada tahun 2004 menjadi sebesar 29 persen.

4.3 Analisis Kinerja Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan PAD

4.3.1 Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan terhadap potensinya dengan anggapan semua wajib pajak/retribusi daerah dapat membayar seluruh pajak/retribusi yang terhutang. Karena kesulitan menemukan besarnya potensi PAD, maka besarnya potensi dianggap sama dengan perkiraan hasil pungutan (target) yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran tertentu. Tingkat efektivitas penerimaan PAD di Kota Yogyakarta terlihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5. Tingkat Efektivitas Penerimaan PAD di Kota Yogyakarta Tahun 2001 – 2004

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Efektivitas
2001	33,125,458,598,74	40,352,592,890,43	1,22
2002	49,685,313,410,17	56,377,459,498,89	1,13
2003	56,822,010,000,00	68,621,564,311,07	1,21
2004	70,412,081,000,00	79,911,419,100,82	1,13

Sumber: Bagian Perekonomian dan PAD Kota Yogyakarta, data diolah

Sedangkan tingkat efektivitas pajak merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak terhadap potensinya dengan anggapan semua wajib pajak daerah dapat membayar seluruh pajak yang terhutang. Karena kesulitan menemukan besarnya potensi pajak, maka besarnya potensi dianggap sama dengan perkiraan hasil pungutan pajak (target pajak) yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran tertentu. Tingkat efektivitas penerimaan pajak di Kota Yogyakarta terlihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta Tahun 2001 – 2004

Tahun	Target Pajak	Realisasi Pajak	Efektivitas
2001	17,814,447,519,50	22,886,374,632,50	1,28
2002	27,107,396,233	30,517,591,846,50	1,13
2003	32,068,358,000	33,526,514,267,53	1,05
2004	38,149,900,000	40,581,212,256,00	1,06

Sumber: Bagian Perekonomian dan PAD Kota Yogyakarta, data diolah

Selama periode pengamatan, penerimaan PAD serta penerimaan pajak cenderung efektif. Dalam hal ini berarti penerimaan melebihi target yang ditetapkan.

4.3.2 Analisis Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah dengan realisasi pajak daerah dalam satu tahun. Tingkat efisiensi penerimaan pajak di Kota Yogyakarta terlihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7. Tingkat Efisiensi Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta Tahun 2001 – 2004

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak	Realisasi Pajak	Efisiensi
2001	1,172,946,735	22,886,374,632,50	5%
2002	1,162,011,825	30,517,591,846,50	4%
2003	2,118,344,209	33,526,514,267,53	6%
2004	941,914,425	40,581,980,256,00	2%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kota Yogyakarta, Bagian Perekonomian dan PAD Kota Yogyakarta, data diolah

Biaya pemungutan pajak pada tahun 2001 dimasukkan dalam biaya perjalanan dinas tetap yang dapat dilihat pada lampiran 3. Begitu juga dengan tahun 2002, biaya pemungutan pajak masih dimasukkan dalam biaya perjalanan dinas tetap yang dapat dilihat pada lampiran 4. Namun, pada tahun 2003 dan 2004 biaya pemungutan pajak sudah mengalami pemisahan menurut jenis pajaknya. Untuk masing-masing jenis pajak, realisasi biaya dibagi menjadi 3 komponen, yaitu: belanja pegawai, belanja barang dan belanja perjalanan. Untuk mendapatkan jumlah biaya pemungutan pajak yaitu melalui penjumlahan realisasi biaya yang terjadi pada seluruh jenis pajak pada tahun yang bersangkutan. Jumlah biaya pemungutan untuk setiap jenis pajak pada tahun 2003 dan 2004 dapat dilihat pada lampiran 5 dan lampiran 6.

Selama periode pengamatan, penerimaan pajak daerah cenderung efisien. Dalam hal ini berarti biaya pemungutan pajak yang mengalami penurunan terhadap realisasi pajak daerah.

4.4 Komposisi dan Pertumbuhan Pajak

4.4.1 Komposisi Pajak

Kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap total penerimaan pajak di Kota Yogyakarta selama tahun 2001 sampai 2004 tampak pada tabel 4.8. di bwah ini:

Tabel 4.8. Komposisi Jenis Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001 – 2004

No.	Jenis Pajak	2001	2002	2003	2004
1.	Pajak Hotel & Restoran	53,50	52,57	53,06	54,86
2.	Pajak Hiburan	5,58	5,49	5,51	4,67
3.	Pajak Reklame	3,76	5,92	5,55	4,91
4.	Pajak Penerangan Jalan	34,05	33,96	35,22	34,93
5.	Pajak Parkir	-	-	0,66	0,63
6.	Pajak Pemanfaatan ABT dan PA	3,11	2,06	-	-
Total		100	100	100	100

Sumber: Bagian Perekonomian dan PAD Kota Yogyakarta, data diolah

Pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat dua jenis pajak yang dominan terhadap total pajak Kota Yogyakarta, antara lain: Pajak Hotel dan Restoran (rata-rata diatas 50 persen) dan Pajak Penerangan Jalan (rata-rata diatas 30 persen).

4.4.2 Pertumbuhan Pajak

Pertumbuhan tiap jenis pajak Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi selama periode pengamatan.

Tabel 4.9. Pertumbuhan Penerimaan Jenis-jenis Pajak Daerah Tahun 2001 – 2004

No.	Jenis Pajak	2002	2003	2004
1.	Pajak Hotel & Restoran	0,50	0,58	0,63
2.	Pajak Hiburan	0,05	0,06	0,007
3.	Pajak Reklame	0,12	0,02	0,02
4.	Pajak Penerangan Jalan	0,34	0,48	0,34
5.	Pajak Parkir	-	0,04	0,005
6.	Pajak Pemanfaatan ABT dan PA	-0,01	-	-

Sumber: Bagian Perekonomian dan PAD Kota Yogyakarta, data diolah

Pada tabel diatas terlihat bahwa Pajak Hotel dan Restoran serta Pajak Hiburan mengalami peningkatan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan mengalami penurunan. Pajak Parkir baru muncul pertumbuhannya pada tahun 2003.

4.5 Komposisi dan Pertumbuhan Retribusi

4.5.1 Komposisi Retribusi

Selama periode pengamatan, retribusi yang memberi sumbangan terbesar terhadap total penerimaan retribusi daerah di Kota Yogyakarta adalah Retribusi Pasar dengan kontribusi rata-rata 26 persen. Tiga peringkat terbesar berikutnya berturut-turut adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD (23 persen), Retribusi Terminal (11 persen) dan Retribusi Pelayanan Kesehatan/Dinas Kesehatan (10 persen). Secara lebih lengkap, komposisi retribusi terhadap total penerimaan distribusi dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10. Komposisi Jenis Retribusi terhadap Penerimaan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2001 – 2004

No.	Jenis Retribusi	2001	2002	2003	2004
1.	Ret. Pelayanan Kesehatan/Dinas Kesehatan	32,21	2,64	2,82	3,02
2.	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3,16	3,05	4,09	4,20
3.	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP & Ak. Cpil	3,11	4,16	3,61	2,97
4.	Ret. Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	0,30	0,23	0,21	0,18
5.	Ret. Parkir Di Tepi Jalan Umum	4,94	4,13	3,96	4,82
6.	Ret. Pasar	32,23	27,59	25,18	22,28
7.	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	2,46	2,95	2,97	2,51
8.	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	0,37	0,36	0,33	0,31
9.	Ret. Terminal	9,42	10,68	12,57	11,16
10.	Ret. Tempat Khusus Parkir	1,22	1,20	1,60	1,83
11.	Ret. Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa	0,01	0,01	0,01	0,01
12.	Ret. Rumah Potong Hewan	2,46	1,98	1,72	1,54
13.	Ret. Pengolahan Limbah Cair	0,74	0,65	0,60	0,54
14.	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,36	0,32	0,33	0,35
15.	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	4,39	6,02	5,61	7,37
16.	Ret. Ijin Gangguan	2,62	2,81	2,68	2,44
17.	Ret. Perijinan Angkutan	-	0,52	0,51	0,58
18.	Ret. Pasar Hewan	-	0,24	0,22	0,20
19.	Ret. Pelayanan Kesehatan RSUD	-	30,30	30,40	33,38
20.	Ret. Usaha Kepariwisataan	-	0,16	0,58	0,31
		100	100	100	100

Sumber: Bagian Perekonomian dan PAD Kota Yogyakarta, data diolah

4.5.2 Pertumbuhan Retribusi

Pertumbuhan tiap jenis retribusi terlihat sangat fluktuatif. Retribusi yang memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata tertinggi adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD (86 persen). Selanjutnya secara berturut-turut peringkat pertumbuhan retribusi adalah Retribusi Terminal (16 persen), Retribusi ijin mendirikan bangunan (11 persen), Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (6 persen), Retribusi Pasar (6 persen), Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (4 persen), Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Capil (3 persen), Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (3 persen), Retribusi Tempat Khusus Parkir (3 persen), dan Retribusi Ijin

Gangguan (2 persen). Di luar retribusi yang telah disebutkan, semuanya memiliki pertumbuhan bervariasi, termasuk retribusi yang tumbuh dengan nilai negatif.

Tabel 4.11. Pertumbuhan Penerimaan Jenis-jenis Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2001 – 2004

No.	Jenis Retribusi	2002	2003	2004	Average
1.	Ret. Pelayanan Kesehatan/Dinas Kesehatan	-1,41	0,04	0,04	-0,44
2.	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,03	0,12	0,05	0,06
3.	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP & Ak. Cpil	0,09	-0,005	-0,006	0,03
4.	Ret. Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	-0,001	0,0006	0,0001	-0,0001
5.	Ret. Parkir Di Tepi Jalan Umum	0,002	0,03	0,10	0,04
6.	Ret. Pasar	0,05	0,07	0,06	0,06
7.	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	0,05	0,03	-0,0005	0,03
8.	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	0,003	0,001	0,002	0,002
9.	Ret. Terminal	0,17	0,27	0,03	0,16
10.	Ret. Tempat Khusus Parkir	0,01	0,05	0,03	0,03
11.	Ret. Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa	0,0002	0,0001	-0,0002	0,00003
12.	Ret. Rumah Potong Hewan	-0,004	-0,002	0,005	-0,0003
13.	Ret. Pengolahan Limbah Cair	0,002	0,002	0,002	0,002
14.	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,001	0,004	0,005	0,003
15.	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	0,14	0,03	0,17	0,11
16.	Ret. Ijin Gangguan	0,04	0,02	0,01	0,02
17.	Ret. Perijinan Angkutan	0,03	0,005	0,01	0,015
18.	Ret. Pasar Hewan	0,01	0,0009	0,0007	0,004
19.	Ret. Pelayanan Kesehatan RSUD	1,78	0,31	0,50	0,86
20.	Ret. Usaha Kepariwisataan	0,009	0,04	-0,01	0,013

Sumber: Bagian Perekonomian dan PAD Kota Yogyakarta, data diolah

4.6 Klasifikasi Pajak dan Retribusi

Pengklasifikasian ini dimaksudkan untuk mengelompokkan pajak atau retribusi ke dalam empat macam klasifikasi yaitu:

- **Prima**. Jika rasio pertumbuahn pajak atau retribusi dan rasio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak atau retribusi daerah keduanya lebih besar atau sama dengan satu.

- **Potensial**. Jika rasio pertumbuhan pajak atau retribusi lebih kecil atau sama dengan satu dan rasio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak atau retribusi daerah lebih besar atau sama dengan satu.
- **Berkembang**. Jika rasio pertumbuhan jenis pajak atau retribusi lebih besar atau sama dengan satu atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak atau retribusi daerah lebih kecil atau sama dengan satu.
- **Terbelakang**. Jika rasio pertumbuhan jenis pajak atau retribusi dan rasio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak atau retribusi daerah keduanya lebih kecil atau sama dengan satu.

Kebijakan yang dapat diterapkan dalam usaha peningkatan klasifikasi pajak atau retribusi akan berbeda-beda. Jika pajak tau retribusi termasu prima, maka kebijaksanaan yang diterapkan pada tahun sebelumnya dapat tetap digunakan dengan tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya. Jika potensial, upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi, sehingga terjadi pertumbuhan yang tinggi. Jika klasifikasinya berkembang, upaya peningkatan dilakukan dengan menggali sumber-sumber baru sambil mempertahankan tingkat pertumbuhan pajak dan retribusi tahun sebelumnya. Dan jika diklasifikasikan terbelakang, maka upaya peningkatannya dilakukan dengan menggali sumber-sumber penerimaan baru dan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi tahun sebelumnya.

4.6.1 Klasifikasi Pajak

Berdasarkan tabel 4.12. dari 6 jenis pajak yang ada di Kota Yogyakarta termasuk pajak yang baru dipungut pada tahun 2003. Ada lima jenis pajak yang mempunyai klasifikasi potensial. Secara umum kondisi pajak di Kota Yogyakarta tergolong baik karena mampu mempertahankan klasifikasi *potensial*, dan untuk Pajak Parkir yang baru dipungut tahun 2003 perlu upaya peningkatan penerimaan dari tahun sebelumnya sehingga terjadi peningkatan klasifikasi. Secara lengkap, klasifikasi dari jenis-jenis pajak tersebut dapat dilihat pada tabel 4.12. berikut

Tabel 4.12. Klasifikasi Jenis-jenis Pajak Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2001 – 2004

No.	Jenis Pajak	2002	2003	2004
1.	Pajak Hotel & Restoran	Potensial	Potensial	Potensial
2.	Pajak Hiburan	Potensial	Potensial	Potensial
3.	Pajak Reklame	Potensial	Potensial	Potensial
4.	Pajak Penerangan Jalan	Potensial	Potensial	Potensial
5.	Pajak Parkir	-	Terbelakang	Terbelakang
6.	Pajak Pemanfaatan ABT & PA	Potensial	-	-

Sumber: Bagian Perekonomian dan PAD Kota Yogyakarta, data diolah

4.6.2 Klasifikasi Retribusi

Sepanjang periode pengamatan, ada 20 jenis retribusi di Kota Yogyakarta, namun hanya sejenis yang memiliki karakteristik *prima* dan *potensial* yaitu; Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD. Sementara terdapat 8 jenis retribusi yang tergolong *terbelakang* yaitu; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab IV mengenai efektivitas serta efisiensi pajak dan retribusi Kota Yogyakarta dalam era otonomi daerah, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Dari eksplorasi data sekunder dapat diketahui bahwa peranan PAD dalam mendukung APBD masih rendah, dengan demikian RAPBD Kota Yogyakarta belum didukung oleh kemandirian daerah secara fiskal. Hal ini dapat terlihat dari tabel 4.2. yang menunjukan bahwa peranan PAD hanya antara 10 hingga 20 persen dalam memdukung APBD. Dan dilihat dari struktur PAD pada tabel 4.2., diketahui bahwa pajak daerah memiliki proporsi terbesar dalam pembentukan PAD sampai tahun 2004. Di sisi lain proporsi retribusi mengalami pola perubahan yang sama dengan pajak setiap tahunnya.
2. Dari rasio PAD terhadap TPD pada tabel 4.3., diperoleh informasi bahwa derajat desentralisasi fiskal Kota Yogyakarta masih relatif rendah yaitu antara 19 hingga 23 persen, berarti tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih relatif rendah. Sementara itu, jika dilihat dari rasio sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat terhadap penerimaan daerah pada tabel 4.3., terlihat

bahwa ketergantungan keuangan pemerintah Kota Yogyakarta masih tinggi, rata-rata 70 persen.

3. Selama periode pengamatan, penerimaan PAD terutama pajak cenderung efektif atau penerimaan melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan dalam penerimaan pajak daerah juga cenderung efisien. Dalam hal ini berarti biaya pemungutan pajak yang mengalami penurunan terhadap realisasi pajak daerah. Efektivitas pajak dapat dilihat pada tabel 4.6. dan efisiensi pajak terlihat dari tabel 4.7.
4. Pada tabel 4.12. berdasarkan klasifikasinya maka terdapat lima jenis pajak yang mempunyai klasifikasi *potensial* yaitu Pajak Hotel dan restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pemanfaatan ABT dan PA sementara Pajak Parkir tergolong *terbelakang* mengingat pajak tersebut baru mulai dipungut tahun 2003. sedangkan dari klasifikasi retribusi, dari 20 jenis retribusi di Kota Yogyakarta, namun hanya sejenis yang memiliki karakteristik *prima* dan *potensial* yaitu; Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD. Sementara pada tabel 4.13. terdapat 8 jenis retribusi yang tergolong *terbelakang* yaitu; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Perijinan Angkutan, Retribusi Pasar Hewan dan Retribusi Usaha

Kepariwisataan. Sedangkan 11 jenis retribusi yang lain memiliki karakteristik *potensial*.

5.2. Saran

1. Dalam menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi pemerintah Kota Yogyakarta hendaknya menyesuaikan dengan potensi pajak dan retribusi itu sendiri. Meskipun tentu saja penerimaan pajak dan retribusi yang sesuai dengan potensinya tidak dapat dicapai dalam waktu dekat.
2. Perlu diadakan estimasi potensi pajak dan retribusi secara berkala, mengingat perubahan klasifikasi pajak dan retribusi itu sendiri dapat berubah dari waktu ke waktu.

5.3. Keterbatasan Penelitian

1. Pada penelitian ini, peneliti memakai potensi PAD dan pajak dengan anggapan bahwa potensi dianggap sama dengan perkiraan hasil pungutan (target) yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran tertentu Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan estimasi potensi PAD serta pajak yang sesungguhnya.
2. Dalam penelitian ini menggunakan data penelitian yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan data penelitian yang berbeda.

REFERENSI

Ansar, *Strategi Pengolahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sektor Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi(Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke)*, Jurnal Ekonomi Unmer, Vol. 9, No. 1, Januari 2005, Hal. 24-39.

BPKD Kota Yogyakarta, *Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA. 1999/2000 s/d 2000/2001 Kota Yogyakarta.*

_____, *Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2002 s/d 2004 Kota Yogyakarta.*

BPS Kota Yogyakarta, *Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2001.*

_____, *Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2002.*

_____, *Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2003.*

_____, *Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2004.*

Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004.

_____, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004.

KPPD Kota Yogyakarta, *Laporan Belanja Rutin Tahun 2001 Kota Yogyakarta.*

_____, *Laporan Belanja Rutin Tahun 2002 Kota Yogyakarta.*

_____, *Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Belanja Operasi dan Pemeliharaan Tahun 2003 Kota Yogyakarta.*

_____, *Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Belanja Operasi dan Pemeliharaan Tahun 2004 Kota Yogyakarta.*

Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah,* Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 3, No. 2, Agustus 2001, Hal. 441-456.

_____, *Otonomi & Manajemen Keuangan* Daerah, Edisi II, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004.

Nugroho, Muh. Awal Satrio, *Seputar Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah,* Telaah Bisnis, Vol. 1, No. 1, Juli 2000, Hal. 13-21.

Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2003

Nuryadin, Didi, *Analisa Potensi Pajak dan Retribusi Kota Magelang,* Buletin Ekonomi, Vol. 2, No. 2, Agustus 2004, Hal, 136-156.

Prakosa, Kesit Bambang, Pajak dan Retribusi Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Prawirosetoto, F.X. Yuwono, *Desentralisasi Fiskal*, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol. 2, No. 2, Agustus 2002, Hal. 132-143.

Samudra, Azhari A, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Soeratno, Yunasman, *Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Solok*, Kajian Bisnis, No. 26, Mei – Agustus 2002, Hal. 47-53.

Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya, Departemen Dalam Negeri, 2004.

Undang-Undang Otonomi Daerah, Arkola, Surabaya, 2004.

Himpunan Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2005.

LAMPIRAN 1
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TA. 2001

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

AYAT	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	ANGGARAN 2001	REALISASI 2001	%
1	2	3	4	5
1.2	BAG. PENDPT. ASLI DAERAH	33.125.458.598,74	40.352.592.890,43	121,82
1.2.1	POS PAJAK DAERAH	17.814.447.519, 50	22.886.374.632,50	128,47
004	1. Pajak hotel dan restauran	10.850.000.000,00	12.245.242.445,00	112,86
005	2. Pajak hiburan	1.081.492.719,00	1.275.803.369,50	117,97
006	3. Pajak reklame	496.248.300,00	861.434.385,00	173,59
007	4. Pajak penerangan jalan	4.800.000.000,00	7.793.350.928,00	162,36
009	5. Pajak pemanfaatan ABT dan AP	586.706.500,00	710.543.505,00	121,11
1.2.2	POS RETRIBUSI DAERAH	11.503.842.081,00	11.773.895.345,16	102,35
001	RET. Palayanan kesehatan/Dinkes	3.889.550.305,00	3.792.826.861,00	97,51
	I. Puskesmas non perawatan.	242.389.400,00	225.342.725,00	92,97
	Bea puskesmas tegal rejo	34.835.420,00	39.379.720,00	113,05
	Bea puskesmas mergangsan	14.360.300,00	16.860.100,00	117,41
	Jasa saran PT. Askes	16.039.620,00	19.168.800,00	119,51
	Bea BKIA/Pemriksaan kualitas air	4.010.000,00	2.202.000,00	54,91
	Bea poliklinik gigi	0,00	0,00	-
	II. RSUD/pendapatan fungsional	2.944.500.000,00	3.479.673.516,00	118,18
	Pendapatan non fungsional	10.500.000,00	10.200.000,00	97,14
	Perkiraan sisa lebih Pendpt Th yl	622.915.565,00	0,00	-
002	Ret. Pel. Persampahan/kebersihan	397.311.850,00	372.107.425,00	93,66
	- Ret. Pel. Persampahan/kebersihan.	353.769.600,00	372.107.425,00	105,18
	- Pencairan tunggakan	43.542.250,00	0,00	-
003	Ret. Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil			
	1. Formulir-formulir Rp. 500,-	343.997.750,00	365.623.200,00	106,29
	2.a. Biaya pembaharuan Ktp.	64.300.000,00	77.356.500,00	120,31
	- KTP. WNI Rp. 2000,-	171.592.750,00	185.111.000,00	107,88
	- KTP. WNA Rp. 5000,-	171.492.750,00	185.111.000,00	107,94
	- KTP. Pra ksrp Rp. 1000,-	100.000,00	0,00	-
	b. Kipem	-	-	-
	3.a SRT. Ket. Kelahiran (WNI)	6.500.000,00	7.305.000,00	112,38
	SRT. Ket. Kelahiran (WNA)	3.000.000,00	3.516.500,00	117,22
	b. SRT. Ket. Kematian	30.000,00	0,00	-
	c. SRT. Ket. Lahir mati	1.200.000,00	1.215.500,00	101,29
	d. SRT. Ket. Pindah penduduk WNI	4000,00	500,00	-
	- SRT. Ket. Pindah penduduk WNA	4.000.000,00	3.443.500,00	86,09
	e. SRT. Ket. Pindah penduduk musiman.	60.000,00	10.000,00	-
	f. SRT. Ket. Pindah penduduk sementara	10.000,00	0,00	-
	g. SRT. Pengantar pindah.	10.000,00	0,00	-
	h. SRT. Ket. Tempat tinggal (SKTT)	10.000,00	0,00	-
091	i. SKPPS Rp. 20.000,-	6000,00	2.000,00	33,33
	j. SKPPT Rp. 10.000,-	100.000,00	340.000,00	340,00
	k. SRT. Perubahan kewarganegaraan	200.000,00	100.000,00	50,00
	L. SRT. Ket. Tidak keberatan ganti nama.	225.000,00	225.000,00	100,00
	4. Kutipan Akta Capil	750.000,00	150.000,00	20,00
004	RET. Pel. Pemakaman dan pengabuan.	92.000.000,00	86.847.700,00	94,40
005	RET. Perkir di tepi jalan umum.	30.112.500,00	35.535.000,00	118,01
	a. Retribusi parkir di parkir umum	549.222.400,00	581.837.700,00	105,94
	b. Sekateman	547.552.400,00	574.162.700,00	104,86
		1.670.000,00	7.675.000,00	459,58

1	2	3	4	5
004	Ret. Pasar	3.551.568.556,00	3.795.136.711,16	106,86
	a. Ret Pasar	3.516.502.206,00	3.760.480.261,16	106,94
	1. Kios/Gedung	312.728.025,00	326.885.935,00	104,53
	2. Dalam Los	2.275.753.812,00	2.339.366.372,00	102,80
	3. Luar Los	121.132.800,00	125.824.325,00	103,87
	4. Luar Pasar	214.042.725,00	217.632.550,00	101,68
	5. Pasar Khusus	59.185.200,00	59.477.000,00	100,49
	6. Titipan Sepeda/Kendaraan	59.325.000,00	58.610.000,00	98,79
	7. Bongkar Muat	16.172.400,00	16.439.400,00	101,65
	8. Memasukkan Barang. Dagangan	4.702.650,00	4.833.350,00	102,78
	9. Pencairan Tunggakan	201.659.600,00	310.096.705,00	153,77
	- Kios	13.699.600,00	37.866.150,00	276,40
	- Dalam Los	187.960.000,00	272.230.555,00	144,83
	10. Lain-lain/Anginan	248.249.994,00	297.702.024,16	119,92
	- BBN	68.613.940,00	118.010.580,00	171,99
	- Bea Administrasi	4.526.000,00	4.182.000,00	92,40
	- GOC-KEP	0,00	0,00	-
	- KM/WC	119.949.600,00	117.130.300,00	97,65
	- GOC Karcis KM/WC	0,00	0,00	-
	- Listrik	34.318.434,00	48.584.244,16	40,50
	- Sewa Lahan	20.842.020,00	9.794.900,00	47,00
	- Lift	0,00	0,00	-
	11. Sekaten	3.550.000,00	3.612.600,00	101,76
	b. Retribusi Pasar Hewan	35.066.350,00	34.656.450,00	98,83
	1. Pasar Hewan	9.362.250,00	9.379.500,00	100,18
	- Hewan besar	8.979.000,00	8.985.900,00	100,08
	- Hewan kecil	383.250,00	393.600,00	102,70
	2. Pasar Pendukung	10.095.900,00	9.777.100,00	96,84
	- Kios	8.760.000,00	8.563.500,00	97,76
	- Los	876.000,00	761.800,00	86,96
	- Lahan	459.900,00	451.800,00	98,24
	3. Sewa kandang hewan 1 tahun	3.449.250,00	3.591.000,00	104,11
	4. Tunggakan Kios	395.000,00	396.000,00	100,25
	5. Surat Penjualan hewan	6.113.750,00	6.121.800,00	100,13
	- Hewan besar	5.986.000,00	5.990.600,00	100,08
	- Hewan kecil	127.750,00	131.200,00	102,70
	6. Surat pembelian hewan	5.650.200,00	5.391.050,00	95,41
	- Hewan besar	5.548.000,00	5.297.600,00	95,49
	- Hewan kecil	102.200,00	93.450,00	91,44
	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	298.000.000,00	289.082.010,00	97,01
012	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	35.219.770,00	43.932.800,00	124,74
	1. Dinas Pekerjaan Umum	32.439.800,00	41.716.800,00	128,60
	- Biaya SAH dan Ijin Masuk/In Gang	23.334.800,00	29.319.300,00	125,65
	- Sewa Mesin Gilas	4.200.000,00	7.027.500,00	167,32
	- Penjualan Drum Aspal Bekas	4.905.000,00	5.370.000,00	109,48
	2. Dinas Kesehatan	2.779.970,00	2.216.000,00	79,71
	- Pelayanan mobil jenazah	2.779.970,00	2.216.000,00	79,71
014	Retribusi Terminal	1.184.984.650,00	1.108.586.990,00	93,55
	A. 1. Ret. Terminal bis umum	309.848.500,00	318.482.500,00	102,79
	- Bis cepat	120.450.000,00	122.565.300,00	101,76
	- Bis lambat	189.399.500,00	195.917.200,00	103,44
	2. Ret. Terminal bis kota	204.765.000,00	201.500.100,00	98,41
	3. Bea masuk halaman terminal	32.502.400,00	11.999.800,00	36,81
	a. Kendaraan roda 4/KTP/Listrik	2.000.000,00	940.000,00	-
	b. Andong, becak/Jasa Ruang Tg	150.000.000,00	64.113.700,00	-
	c. Kendaraan roda 2/4	0,00	20.347.800,00	-
	d. Penjaja	0,00	2.084.100,00	-
	4. Lain-lain	401.354.550,00	409.273.690,00	101,97
	a. Sewa loket penjualan karcis	67.980.800,00	69.259.800,00	101,88
	b. Tempat WC	333.373.750,00	334.869.390,00	100,45
	c. Kendaraan menginap	0,00	3.279.500,00	-
	d. Sewa lahan parkir	0,00	1.865.000,00	-
	5. Sewa petak kios/retribusi kios	36.134.200,00	37.611.400,00	104,09
	B. TPR Non bis angkutan antar kota	48.290.000,00	42.233.900,00	87,48

1	2	3	4	5
015	Retribusi tempat khusus parkir	123.450.000,00	143.129.500,00	115,94
017	Ret. Tempat penginapan/pesanggrahan	1.173.600,00	742.500,00	63,27
019	Ret. Rumah potong hewan	307.283.750,00	290.306.946,00	94,48
	a. Ongkos periksa	48.180.000,00	48.294.600,00	100,24
	b. Sewa kand. Perist/periks. Ulang	8.395.000,00	80416.300,00	100,25
	c. Sewa tempat pemotongan	99.280.000,00	99.708.600,00	100,43
	d. Periksa daging	131.856.250,00	114.484.946,00	86,83
	e. Pelayanan pengangkutan daging	365.000,00	370.500,00	101,51
	f. Periksa hewan betina	600.000,00	450.000,00	75,00
	g. Pemeriksaan hasil monitoring daging	540.000,00	585.000,00	108,33
	h. Pemeriksaan pelayuan daging	18.067.500,00	17.997.000,00	99,61
	i. Lain-lain biaya tuberkolosis	0,00	0,00	-
023	Ret. Pengolahan limbah cair	86.008.000,00	87,202.000,00	101,39
024	Ret. Penjualan produksi usaha daerah	40.582.950,00	42.076.250,00	103,68
	a. Hasil kebun bibit	30.742.950,00	31.930.950,00	103,86
	- Dongkelan timur	6.500.000,00	6.844.500,00	105,30
	- Dongkelan barat	3.800.000,00	3.914.000,00	103,00
	- Kebun bibit Tegalrejo	10.267.700,00	10.586.700,00	103,11
	- Kebun bibit Giwangan	10.175.250,00	10.585.750,00	104,03
	b. Balai benih ikan mendungan	4.950.000,00	5.175.300,00	104,55
	c. Tanah bagi hasil	1.510.000,00	1.510.000,00	100,00
	d. Tanaman hias	2.700.000,00	2.766.000,00	102,44
	e. Ikan hias	680.000,00	694.000,00	102,06
026	Retribusi ijin mendirikan bangunan	408.000.000,00	517.381.300,00	126,81
028	Retribusi ijin gangguan	257.376.000,00	308.388.150,00	116,82
1.2.3	POS BAG. LABA BUMD	2.249.570.045,51	2.249.570.025,31	100,00
001	Bank Pembangunan daerah	1.055.039.370,17	1.055.039.349,97	100,00
	a. Devident.	791.279.532,17	791.279.512,48	100,00
	b. Dana pembangunan daerah	263.759.838,00	263.759.837,49	100,00
	c. Kekurangan Devident tahun lalu	-	-	-
002	PDAM Tirtamarta	1.052.926.000,00	1.052.926.000,00	100,00
003	PD. BPR. Bank pasar	141.604.675,34	141.604.675,34	100,00
1.2.4	POS LAIN-LAIN PENDAPATAN	1.557.098,73	3.442.752.889,46	221,10
001	Hasil penjualan milik daerah	0	0	
002	Jasa giro	394.235.571,60	955.376.083,00	242,34
	Jasa giro kantor/Dinas/Bagian	500.000,00	1.100.000,00	220,00
004	Penerim. Ganti rugi atas kekayaan daerah	0,00	0,00	-
005	Setoran keleb. Pembayaran kpd. Phk ke 1	2.320.620,00	3.760.642,00	-
006	Denda keterlambatan pelaks. pek. daerah.	0,00	0,00	-
009	Sisa uang untuk dipertanggungjawabkan	0,00		-
010	Dokumen lelang	0,00	5.584.869,00	-
011	Setoran keleb. pembay. hsl pemeriksaan	204.800.000,00	204.800.000,00	-
012	Penerimaan dr phk ke 3 yg bkn perush.	0,00	0,00	#DIV/0!
	- Kontrak kerjasama dg PT. CBA	0,00	0,00	#DIV/0!
	- Pengelolaan Shopping Centre ST	0,00	0,00	#DIV/0!
013	Bea Pertanahan	70.791.500,00	104.541.600,00	147,68
	a. Uang pemakaian atas tanah			
	RI. 10 bdx350m2xRp. 200.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	BI. 34 bdx400m2xRp. 150.000,00	0,00	0,00	-
	R2. 20 bdx300m2xRp. 100.000,00	0,00	0,00	-
	B2. 42 bdx300m2xRp. 75.000,00	0,00	0,00	-
	SI. 40 bdx150m2xRp. 40.000,00	0,00	0,00	-
	S2. 23 bdx300m2xRp. 25.000,00	0,00	0,00	-
	b. Ganti patok beton/tanda batas pers.			-
014	Pendapatan lain-lain	884.951.261,13	2.167.589.655,46	#DIV/0!
	1. Bagian keuangan	844.914.090,00	454.772.664,00	244,94
	2. Dipenda (ganti ongkos cetak karcis)	40.656.000,00	8.988.760,00	53,82
				22,11

LAMPIRAN 2
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002 S/D 2004

KODE	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN TA 2002	REALISASI TA 2002	% 4:3	ANGGARAN TA 2003	REALISASI TA 2003	% 7:6	ANGGARAN TA 2004	REALISASI TA 2004	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.0.0.1.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	49,686,313,410.17	56,377,469,498.89	113.47	56,822,010,000.00	68,621,664,311.07	120.77	70,412,081,000.00	79,911,419,100.82	113.49
1.0.1.1.	PAJAK DAERAH	27,107,395,233.00	30,517,591,845.50	112.58	32,068,368,000.00	33,626,614,257.63	104.86	38,149,900,000.00	40,581,212,266.00	106.37
	Pajak Hotel dan Restoran	13,930,987,900.00	16,041,968,362.00	115.15						
1.01.08.1.1.01.	Pajak Hotel				11,849,490,000.00	11,859,150,696.00	100.08	14,228,000,000.00	14,408,220,726.00	101.27
	1. Hotel Berbintang							12,756,014,000.00	13,725,588,140.00	107.60
	2. Hotel Melati							1,309,521,000.00	587,089,256.00	44.83
	3. Hotel Non Melati							87,468,000.00	21,973,457.00	25.12
	4. Tunggakan							75,000,000.00	73,569,873.00	98.09
1.01.08.1.1.01.	Pajak restoran				5,011,661,000.00	5,928,675,731.63	118.30	7,272,000,000.00	7,855,853,688.00	108.03
	1. Restoran Besar							6,104,000,000.00	7,175,878,908.00	117.56
	2. Restoran Menengah							644,150,000.00	319,260,871.00	49.56
	3. Resteran Kecil							313,682,000.00	156,919,179.00	50.02
	4. Tungakan							157,000,000.00	165,165,980.00	105.20
	5. Pedagang Kaki Lima							51,168,000.00	36,323,750.00	70.99
	6. Sekaten							2,000,000.00	2,075,000.00	103.75
1.01.08.1.1.03.	Pajak Hiburan	1,677,203,448.00	1,674,682,496.00	99.85	1,782,600,000.00	1,847,967,728.00	103.67	18,469,000,200.00	1,895,162,532.00	10.26
1.01.08.1.1.03.01.	a. GedungBioskop	153,348,475.00	157,982,197.00	103.02	153,348,000.00	221,568,250.00	144.49	168,058,000.00	294,403,035.00	175.18
1.01.08.1.1.03.02.	b. Kebun Binatang Gembiraloka	196,475,312.00	222,420,858.00	113.21	290,000,000.00	220,341,764.00	75.98	200,532,000.00	239,934,588.00	119.65
1.01.08.1.1.03.03.	c. Lain-lain Pertunjukan	1,086,979,661.00	151,593,216.00	13.95	1,198,852,000.00	1,202,062,116.00	100.27	1,250,465,000.00	1,136,096,609.00	90.85
1.01.08.1.1.03.04.	d. Tunggakan	25,400,000.00	26,837,485.00	105.66	25,400,000.00	40,865,860.00	160.89	27,845,000.00	21,911,050.00	78.69
1.01.08.1.1.03.05.	e. Sekaten	115,000,000.00	115,748,740.00	100.65	115,000,000.00	163,119,741.00	141.84	200,000,000.00	202,805,250.00	101.40
1.01.08.1.1.04.	Pajak Reklame	1,713,642,786.00	1,806,236,199.50	105.40	1,661,739,000.00	1,861,620,901.00	112.03	1,820,000,000.00	1,992,190,299.00	109.46
	1. Pajak Reklame	1,700,000,000.00	1,803,235,199.50	106.07	1,648,196,200.00	1,817,879,672.00	110.30	1,740,164,000.00	1,963,911,854.00	112.86
	2. Tunggakan	11,542,785.00	-	0	11,542,800.00	33,911,229.00	293.79	64,269,000.00	12,711,184.00	19.78
	3. Sekaten	2,000,000.00	2,000,000.00	100	2,000,000.00	9,830,000.00	491.50	15,567,000.00	15,567,261.00	100.00
1.01.08.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	9,294,666,100.00	10,364,342,556.00	111.51	11,662,868,000.00	11,809,188,645.00	101.25	12,733,000,000.00	14,176,664,924.00	111.34
1.01.08.1.1.07.	Pajak Parkir							250,000,000.00	253,898,087.00	101.56
	1. Pajak Parkir							249,500,000.00		
	2. Tunggakan							1,500,000.00		
	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pam	590,997,000.00	631,463,242.00	106.85						
1.0.0.1.2.	RETRIBUSI DAERAH	13,991,791,110.00	14,193,467,269.11	101.44	15,718,586,000.00	15,093,220,398.60	96.02	18,269,462,000.00	18,995,046,383.00	103.97
	Ret. Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	331,634,740.00	374,643,970.00	112.97	352,436,000.00	454,457,549.50	128.95	500,000,000.00	574,208,467.00	114.84
	1. Retribusi Pelayanan Puskesmas	206,268,160.00	209,427,650.00	101.53	286,924,000.00	355,169,275.00	123.79	386,550,100.00	464,450,825.00	120.15
	- Puskesmas Pakualaman							10,492,900.00	13,659,200.00	130.18
	- Puskesmas Kotagede II							10,099,500.00	14,037,425.00	138.99
	- Puskesmas Gondokusuman II							13,302,000.00	16,414,850.00	123.40
	- Puskesmas Gondokusuman I							13,068,200.00	19,347,900.00	148.05
	- Puskesmas Danurejan II							12,200,000.00	15,738,900.00	129.01
	- Puskesmas Gondomanan							12,417,100.00	15,278,050.00	123.04
	- Puskesmas Jetis							31,256,600.00	35,777,150.00	114.46
	- Puskesmas Mantrijeren							22,422,250.00	30,760,650.00	137.19
	- Puskesmas Wirobrajan							25,217,600.00	23,062,250.00	91.45
	- Puskesmas Kraton							17,509,600.00	17,065,850.00	97.47
	- Puskesmas Tegalrejo							62,693,850.00	70,944,850.00	113.16
	- Puskesmas Danurejan I							10,500,000.00	12,674,350.00	120.71
	- Puskesmas Mergangsan							56,748,000.00	72,433,900.00	127.64
	- Puskesmas Gedongtengen							18,533,500.00	23,146,600.00	124.89
	- Puskesmas Ngampilan							17,136,900.00	17,615,600.00	102.79
	- Puskesmas Kotagede I							13,038,500.00	14,327,200.00	109.88
	- Puskesmas Umbulharjo I							17,379,400.00	22,949,150.00	132.05
	- Puskesmas Umbulharjo II							22,514,200.00	29,038,650.00	128.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Jasa Sarana PT. Askes	35,760,080.00	57,889,175.50	161.88	57,460,000.00	88,867,274.50	154.66	92,101,900.00	86.00	0.00
	3. Pemeriksaan Kwalitas Air	2,919,000.00	3,308,000.00	113.33	5,051,000.00	8,663,000.00	171.51	18,348,000.00		
	4. Pelayanan Mobil Jenazah				3,000,000.00	1,758,000.00	58.60	3,000,000.00		
	Bea Puskesmas dengan Perawatan Tegalrejo	50,217,750.00	62,428,425.00	124.32						
	Bea Puskesmas dengan Perawatan Mergangsan	36,469,750.00	41,590,725.00	114.04						
1.17.01.1.2.02.	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	438,921,860.00	433,236,550.00	98.70	700,448,000.00	658,486,650.00	94.01	700,448,000.00	799,646,365.00	114.16
	- Ret. Pel. Persampahan/Kebersihan		413,847,875.00			533,656,550.00		548,834,000.00		
	- Ret. Sampah Pasar					124,830,000.00		124,830,000.00		
	- Ret. Sampah Terminal							15,330,000.00		
	- Pencairan Tunggakan		19,387,675.00					11,454,000.00		
	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte Capil	564,119,000.00	590,412,500.00	104.66	580,001,000.00	581,228,800.00	100.21	525,100,000.00		
1.18.01.1.2.03.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP		426,644,000.00		383,344,000.00	425,056,000.00	110.88	626,100,000.00	434,568,000.00	69.41
	I. Jumlah Formulir				63,200,000.00	76,348,500.00	120.80	81,800,000.00		
	II a. Blanko Keluaran (OS)				297,811,000.00	325,069,000.00	109.15	12,000,000.00		
	b. Blanko KTP									
	- KTP WNI tidak terlambat							155,750,000.00		
	- KTP WNI terlambat							166,400,000.00		
	- KTP WNA tidak terlambat							180,000.00		
	- KTP WNA terlambat							30,000.00		
	c. Blanko Kartu Keluarga							22,000,000.00		
	d. Blanko KIPEM							14,000,000.00		
	III. Surat Ket. Lahir							21,840,000.00		
	a. WNI tidak terlambat							3,400,000.00		
	b. WNI Terlambat							1,500,000.00		
	c. WNA tidak terlambat							7,500.00		
	d. WNA terlambat							10,000.00		
	e. Surat Keterangan Kematian							1,116,500.00		
	f. Surat Ket. Lahir-Mati							3,000.00		
	g. Surat Ket. Pindah									
	- Pindah WNI							3,500,000.00		
	- Pindah WNA							10,000.00		
	h. Pindah Penduduk Musiman							10,000.00		
	i. Surat Ket. Pindah Penduduk Sementara							10,000.00		
	j. Surat Pengantar Pindah WNA							10,000.00		
	k. SKKT							70,000.00		
	l. SKPPS							300,000.00		
	m. SKPPT							120,000.00		
	n. SKPSK							100,000.00		
	o. Surat Ket. Ganti Nama							275,000.00		
	p. Surat Ket. Biodata Penduduk				22,333,000.00	22,638,500.00	101.37	5,100,000.00		
	q. Surat Keterangan Camat							4,900,000.00		
	r. Surat Keterangan Lurah							1,400,000.00		
	s. Foto Digital							2,100,000.00		
	t. Blanko Kartu NIK							150,000,000.00		
1.18.01.1.2.04.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil		163,758,500.00		196,657,000.00	156,172,800.00	79.41	100,028,000.00	129,922,700.00	129.89
	1. Akte Kelahiran				130,961,000.00	102,020,000.00	77.90	40,960,000.00		
	2. Akte Perkawinan				25,960,000.00	24,680,000.00	95.07	26,740,000.00		
	3. Akte Perceraian				2,140,000.00	1,620,000.00	75.70	2,140,000.00		
	4. Akte Kematian				1,626,000.00	1,116,000.00	68.63	2,657,000.00		
	5. Akte Pengakuan Anak				1,560,000.00	420,000.00	26.92	1,420,000.00		
	6. Akte Pengesahan Anak				2,250,000.00	600,000.00	26.67	1,450,000.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Pengangkatan Anak				750,000.00	675,000.00	90.00	750,000.00		
	8. Pencatatan Perubahan				3,660,000.00	340,000.00	9.44	3,600,000.00		
	9. Salinan Akte				500,000.00	255,000.00	51.00	500,000.00		
	10. Surat Keterangan				20,620,000.00	18,045,000.00	87.51	13,120,000.00		
	11. Bukti Pelaporan				420,000.00	90,000.00	21.43	420,000.00		
	12. Legalisasi Kutipan Akte				6,010,000.00	5,991,800.00	99.70	6,011,000.00		
	13. Legalisasi Alih Bahasa				260,000.00	320,000.00	123.08	260,000.00		
1.17.01.1.2.06.	Ret. Plyn Pemakaman & Penguburan Mayat	33,350,000.00	32,835,500.00	98.46	33,360,000.00	34,065,000.00	102.11	33,650,000.00	34,427,500.00	102.31
1.16.01.1.2.07.	Retribusi Parkir di Jalan Umum	645,000,000.00	586,297,630.00	90.90	1,125,000,000.00	636,885,940.00	56.61	1,126,000.00	915,936,400.00	81344.26
1.06.02.1.2.08.	Retribusi Pasar	3,826,027,295.00	3,916,504,949.51	102.36	3,996,564,000.00	4,051,143,202.00	101.37	4,080,223,000.00	4,232,821,326.00	103.74
	a. Retribusi Pasar	3,139,205,950.00	3,174,721,500.00	101.13	3,404,429,580.00	3,306,744,659.00	97.13	3,705,089,200.00		
	1. Kios/Gudang	326,583,150.00	338,569,250.00	103.67	357,773,000.00	345,474,725.00	96.56	394,789,000.00		
	2. Dalam Los	2,302,071,360.00	2,329,144,975.00	101.18	2,426,907,700.00	2,343,392,484.00	96.56	2,512,613,000.00		
	3. Luar Los	125,730,500.00	124,911,800.00	99.35	125,585,000.00	127,051,625.00	101.17	126,538,400.00		
	4. Luar Pasar	219,137,325.00	220,197,350.00	100.48	222,039,000.00	221,551,900.00	99.78	225,363,300.00		
	5. Pasar Khusus	59,716,500.00	58,285,575.00	97.60	78,610,400.00	59,121,475.00	75.21	58,975,000.00		
	6. Titipan Sepeda/Kendaraan	84,496,800.00	86,181,750.00	101.99	174,045,780.00	184,268,850.00	105.87	182,295,900.00		
	7. Bongkar Muat	16,535,250.00	12,470,200.00	75.42	14,464,000.00	20,199,000.00	139.65	24,828,000.00		
	8. Menaikkan Barang Dagangan	4,935,075.00	4,960,700.00	100.52	5,004,700.00	5,694,600.00	113.79	5,610,600.00		
	9. Pencairan Tunggakan	257,068,225.00	276,173,984.00	107.43	264,240,300.00	279,285,033.00	105.69	174,075,000.00		
	- Kios/Gudang	33,532,225.00	33,189,675.00	98.98	11,752,800.00	43,391,690.00	369.20	11,267,000.00		
	- Dalam Los	223,535,000.00	242,984,109.00	108.70	252,487,500.00	235,893,343.00	93.43	162,808,000.00		
	10. Lain-lain/Angman	426,185,610.00	462,041,865.51	108.41	323,316,620.00	461,461,110.00	142.73	374,133,800.00		
	- BBN	134,695,080.00	156,798,400.00	116.41	134,695,080.00	227,861,250.00	169.17	153,308,000.00		
	- Bea Administrasi	4,958,000.00	5,518,000.00	111.29	4,958,000.00	5,534,000.00	111.62	5,863,000.00		
	- KM/WC	148,406,190.00	149,292,630.00	100.60	148,406,000.00	164,869,230.00	111.09	164,405,700.00		
	- Listrik	107,248,800.00	88,903,830.57	82.89						
	- Sewa Lahan	30,877,540.00	38,409,375.00	124.39	35,257,540.00	63,196,630.00	179.24	50,557,100.00		
	- Lift		23,119,630.04							
	11. Sekaten	3,567,500.00	3,567,500.00	100.00	3,567,500.00	3,652,400.00	102.38			
	12. Pendapatan Lain-lain				1,000,000.00			1,000,000.00		
1.16.01.1.2.09.	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	372,675,800.00	419,268,769.00	112.50	390,000,000.00	478,479,420.00	122.69	395,000,000.00	477,052,921.00	120.77
1.16.01.1.2.13.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	54,965,000.00	50,664,400.00	92.18	69,255,000.00	63,308,700.00	91.41	71,730,000.00	58,276,875.00	81.24
	1. Dinas	51,965,000.00	50,664,400.00	97.50				71,730,000.00		
	- Biaya SAH	35,810,000.00	35,553,400.00	99.28	44,080,000.00	43,611,200.00	98.94	52,214,000.00		
	- Ijin Jl. Gang							11,156,000.00		
	- Ijin Penyambungan SAH							1,435,000.00		
	- Sewa Alat Berat	6,000,000.00	7,775,000.00	129.58	6,925,000.00	8,495,000.00	122.67	6,925,000.00		
	- Penjualan Drum Aspal Bekas	10,155,000.00	5,340,000.00	52.58	8,250,000.00	1,202,500.00	14.58			
	2. Dinas Kesehatan									
	- Pelayanan Mobil Jenazah	3,000,000.00	1,996,000.00	66.53						
1.16.01.1.2.16.	Retribusi Terminal	1,409,017,075.00	1,515,852,975.00	107.58	1,704,585,000.00	2,023,553,946.00	118.71	2,246,085,000.00	2,119,795,220.00	94.38
	1. Bis Cepat	123,187,500.00	142,128,000.00	115.38		438,891,100.00		500,962,500.00		
	2. Bis AKDP	73,912,500.00				73,125,900.00		73,912,500.00		
	3. Bus Perkotaan	204,765,000.00	211,221,000.00	103.15		219,055,200.00		219,000,000.00		
	4. Parkir Bus	47,763,000.00	84,157,500.00	176.20		378,963,000.00		435,262,500.00		
	5. Parkir Kendaraan Pengantar	40,150,000.00	40,405,000.00	100.64		44,165,000.00		67,850,000.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Jasa Ruang Tunggu	219,000,000.00	220,127,200.00	100.51		201,014,100.00		219,000,000.00		
	7. Kios Tiket Bus	101,616,000.00	104,617,800.00	102.95		106,217,000.00		99,998,700.00		
	8. Kios Pedagang	58,035,000.00	60,423,000.00	104.11		60,882,800.00		71,998,800.00		
	9. Tempat KM/WC	379,475,025.00	379,475,025.00	100.00		417,187,795.00		503,970,000.00		
	10. Moil Penumpang AKAP									
	11. Penitipan orang									
	12. Terminal Terban dan Rejowinangun	7,665,000.00	38,497,000.00	502.24		39,456,500.00		7,665,000.00		
	13. Terminal Terban	25,732,500.00						25,732,500.00		
	14. Pelayanan Kesrsihan	3,358,050.00	4,720,750.00	140.58		8,340,050,000.00		10,295,000.00		
	15. Kartu Tanda Pengenal	2,000,000.00	2,930,000.00	146.50		1,540,000.00		2,000,000.00		
	16. Listrik	2,820,000.00	2,820,000.00	100.00		3,000,000.00		1,500,000.00		
1.16.01.1.2.17.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	168,496,500.00	171,129,960.00	101.56	300,000,000.00	257,063,000.00	85.69	300,000,000.00	347,108,000.00	115.70
1.16.01.1.2.18.	Ret. Tempat Pengimapan/Pesanggrahan-Villa	1,173,500.00	1,176,000.00	100.21	1,174,000.00	1,460,000.00	124.36	1,380,000.00	900,000.00	65.22
1.16.01.1.2.20.	Retribusi Rumah Potong Hewan	308,651,260.00	280,557,100.00	90.90	306,166,000.00	277,076,250.00	90.52	324,602,000.00	291,789,550.00	89.89
	1. Ongkos Periksa	48,180,000.00	44,603,000.00	92.58	48,180,000.00	42,058,000.00	87.29	44,895,000.00		
	2. Sewa kandang peristirahatan	8,395,000.00	7,761,500.00	92.45	8,395,000.00	7,329,000.00	87.30	7,847,500.00		
	3. Sewa tempat pemotongan	99,280,000.00	92,570,500.00	93.24	102,018,000.00	89,695,500.00	87.92	93,257,500.00		
	4. Periksa daging	130,761,250.00	117,415,600.00	89.79	126,746,000.00	118,582,850.00	93.56	155,672,000.00		
	5. Pelayanan Pengangkutan Daging	2,737,500.00	367,500.00	13.42	2,572,000.00	3,601,500.00	140.03	4,015,000.00		
	6. Periksa hewan Betina	150,000.00	175,000.00	116.67	150,000.00	175,000.00	116.67	150,000.00		
	7. Pemeriksaan Hasil Memotong Daging	1,080,000.00	1,350,000.00	125.00	1,620,000.00	1,680,000.00	103.70	2,340,000.00		
	8. Pemakaian Pelayuan Daging	18,067,500.00	16,314,000.00	90.29	16,425,000.00	13,954,500.00	84.96	16,425,000.00		
1.16.01.1.2.24.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	92,156,000.00	92,876,500.00	100.78	96,156,000.00	96,377,000.00	100.23	100,500,000.00	102,515,000.00	102.00
	Pemeliharaan SAL									
	Lain-lain									
1.16.01.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Daerah	43,313,560.00	45,509,860.00	105.07	52,575,000.00	53,450,750.00	101.67	75,888,000.00	67,349,280.00	88.75
	1. Kebun Bibit Tegalrejo	11,054,600.00	11,621,050.00	105.12	12,885,000.00	13,159,000.00	102.13	15,698,000.00		
	2. Kebun Bibit Giwangan	10,570,800.00	11,442,300.00	108.24	12,562,000.00	12,806,750.00	101.95	19,122,000.00		
	3. Balai Benih Ikan Mendungan	5,210,000.00	5,707,500.00	109.55	5,875,000.00	5,906,500.00	100.54	6,700,000.00		
	4. Ikan Hias	710,000.00	731,000.00	102.96	792,000.00	793,500.00	100.19	1,975,000.00		
	5. Kebun Bibit Dongkelan Timur	7,261,000.00	7,362,500.00	101.40	9,488,000.00	9,655,000.00	101.76	23,949,000.00		
	6. Kebun Bibit Dongkelan Barat	4,203,500.00	4,289,000.00	102.03	5,913,000.00	6,024,500.00	101.89			
	7. Taman Hias	2,993,750.00	3,046,500.00	101.76	3,685,000.00	3,730,000.00	101.22	6,752,000.00		
	8. Tanah Bagi Hasil	1,310,000.00	1,310,000.00	100.00	1,376,000.00	1,395,500.00	99.96	699,000.00		
1.16.01.1.2.26.	Retribusi IjinMendirikan Bangunan	750,000,000.00	854,581,400.00	113.94	750,000,000.00	902,268,300.00	120.30	912,500,000.00	1,399,141,525.00	153.33
1.16.01.1.2.28.	Retribusi IjinGangguan/HO	383,851,000.00	398,603,100.00	103.84	413,498,000.00	431,038,129.00	104.24	454,848,000.00	463,400,890.00	101.88
1.16.01.1.2.29.	Retribusi Perijinan Angkutan	50,000,000.00	73,475,000.00	146.95	73,000,000.00	82,040,000.00	112.38	80,000,000.00	110,515,000.00	138.14
1.16.01.1.2.30.	Retribusi Pasar Hewan	35,066,350.00	33,142,175.00	94.51	33,427,000.00	34,945,250.00	104.54	35,562,000.00		
	1. Pasar Hewan	9,362,250.00	8,863,875.00	94.68	8,924,000.00	9,568,050.00	107.22	10,492,000.00		
	2. Pasar Pendukung	10,095,900.00	10,142,525.00	100.46	10,196,000.00	10,237,675.00	100.41	10,274,750.00		
	3. Sewa Kandang Hewan 1 Tahun	3,640,875.00	3,621,975.00	99.48	3,641,000.00	3,703,875.00	101.73	3,640,850.00		
	4. Tunggakan Kios	520,925.00			50,000.00					
	5. Surat Penjualan Hewan	6,113,750.00	5,768,625.00	94.35	5,822,000.00	6,247,450.00	107.31	5,967,750.00		
	6. Surat Pembelian Hewan	5,332,650.00	4,745,175.00	88.98	4,894,000.00	5,188,200.00	106.01	5,186,650.00		
1.16.01.1.2.31.	Retribusi Pelavanan Kesehatan RSUD	4,461,500,000.00	4,300,579,940.00	96.39	4,659,595,000.00	4,892,962,513.00	105.01	6,067,908,800.00	6,339,995,339.00	104.48
	1. Pendapatan Fungsional							6,057,908,000.00		
	1. Administrasi Umum				22,500,000.00	37,419,000.00	166.31	40,000,000.00		
	2. Rawat Jalan		497,233,175.00		459,780,000.00	459,780,000.00	100.00	544,700,000.00		
	a. UGD							300,000,000.00		
	b. Kir Dokter							2,000,000.00		
	c. Check-Up							10,000,000.00		
	d. Spesialis Gigi							40,400,000.00		
	e. Spesialis Anak							30,500,000.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	f. Spesialis Dalam							35,000,000.00		
	g. Spesialis Kebidanan							21,300,000.00		
	h. Spesialis Bedah							30,000,000.00		
	i. Spesialis Kulit							15,200,000.00		
	j. Spesialis Mata							13,300,000.00		
	k. Spesialis Mata							35,500,000.00		
	l. Spesialis Syaraf							6,000,000.00		
	m. Spesialis Jiwa							5,000,000.00		
	3. Rawat Inap		1,306,825,248.00		1,146,368,000.00	1,146,368,000.00	100.00	1,342,768,000.00		
	a. Kenangan							281,750,000.00		
	b. Perinatologi							80,000,000.00		
	c. Anggrek							170,000,000.00		
	d. Dahlia							300,000,000.00		
	e. Bougenvile							330,000,000.00		
	f. ICU/Wijaya Kusuma							1,018,000.00		
	g. Vinolia/VIP							180,000,000.00		
	4. Obat-obatan				2,500,000,000.00	2,540,823,585.00	101.63	3,000,000,000.00		
	5. PHB / Askes				52,600,000.00	190,739,085.00	362.62	500,000,000.00		
	6. Laboratorium				300,000,000.00	337,695,520.00	112.57	400,000,000.00		
	7. Radiologi				127,200,000.00	135,627,625.00	106.63	175,000,000.00		
	8. Ambulance				15,750,000.00	17,748,000.00	112.69	17,500,000.00		
	9. Fisioterapi				10,890,000.00	14,156,700.00	130.00	12,000,000.00		
	10. Perawatan Jenazah				240,000.00	1,205,000.00	502.08	1,440,000.00		
	B. Pendapatan Non Fungsional									
	11. Sewa Kantin		10,200,000.00					10,500,000.00		
	12. Sewa Lahan Parkir				1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	1,500,000.00		
	13. Jasa Giro				9,000,000.00	9,900,000.00	110.00	9,000,000.00		
	14. Trend Mill				13,767,000.00					
	15. Pelayanan Lain-lain							4,000,000.00		
	16. Pendapatan penunjang		2,436,153,433.00					10,000,000.00		
	17. Selisih Bank		8,900.00							
	18. Selisih Pendapatan dan Pengeluaran		50,159,184.00							
1.16.01.1.2.32.	Retribusi Usaha Kepariwisataan	21,872,000.00	22,120,000.00	101.13	91,324,000.00	92,939,000.00	101.77	48,000,000.00	58,605,000.00	122.09
	1. Hotel Bintang 1							496,000.00		
	2. Hotel Melati 3							800,000.00		
	3. Hotel Melati 2							882,000.00		
	4. Hotel Melati 1							9,012,000.00		
	5. Pondok Wisata							410,000.00		
	6. Restoran Talam Kencana							825,000.00		
	7. Restoran Talam Gangsa							2,250,000.00		
	8. Rumah makan Kelas A							1,925,000.00		
	9. Rumah makan Kelas B							1,500,000.00		
	10. Pengantar Wisata							600,000.00		
	11. Biro Perjalanan Wisata							2,300,000.00		
	12. Perminaan Ketangkasan							2,700,000.00		
1.0.0 1.3.	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	2,609,234,852.65	2,609,234,862.65	100.00	2,509,236,000.00	4,081,649,388.86	162.67	5,188,903,000.00	5,285,786,650.47	101.87
1.01.05.1.3.02.01	Bank Pembangunan Daerah	1,216,534,932.65	1,216,534,932.65	100.00	1,216,534,932.65	2,023,124,161.53	166.30	3,655,835,000.00	3,685,835,716.05	100.82
	a. Deviden									
	b. Dana Pembangunan									
1.01.05.1.3.01.02	PD. Air Minum Tirta Marta	1,055,010,000.00	1,055,010,000.00	100.00	1,055,010,000.00	1,732,670,000.00	164.23	1,055,010,000.00	1,154,240,720.00	109.41
1.01.05.1.3.02.02	PD. BPR Bank Pasar	237,689,920.00	237,689,920.00	100.00	237,689,920.00	325,855,227.33	137.09	448,058,000.00	445,710,214.42	99.48
1.0.0.1.4.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	6,076,891,214.32	9,167,175,641.63	150.85	6,525,891,214.32	14,920,180,266.18	228.63	8,802,626,000.00	15,048,605,811.35	170.96
1.01.05.1.4.01.	Hasil Penjualan Barang Milik daerah				8,250,000.00	156,456,700.00	1,896.44	8,250,000.00	345,052,686.33	4182.46
1.01.05.1.4.02.	Jasa Giro	1,000,000,000.00	1,136,702,259.00	113.67	1,050,000,000.00	1,434,408,080.00	136.61	1,050,000,000.00	1,069,995,796.00	101.90
	Jasa Giro Kantor/Dinas/Bagian									
1.01.05.1.4.03.	Listrik Pasar				107,245,000.00	175,262,733.83	163.42	144,314,000.00	211,886,741.97	146.82
1.01.05.1.4.05.	Pendapatan Bunga Deposito				5,000,000,000.00	10,376,861,346.74	207.54	7,000,000,000.00	6,992,929,126.17	99.90
1.01.05.1.4.06.	Denda Keterlambatan Pelaks. Pekerjaan Daerah	1,265,310.00	1,265,310.00	100.00		2,227,068.00			34,553,521.00	
1.01.05.1.4.07.	Penerm. Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)	1,675,000.00	1,675,000.00	100.00	1,260,000.00	1,512,728.00	126.06	1,200,000.00	3,719,000.00	309.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.05.1.4.09.	Sel. Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga									
1.01.05.1.4.10.	Sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP)	13,782,402.00	13,762,000.00	99.85	13,762,000.00				12,359,144.00	
1.01.05.1.4.11.	Setoran Kelebihan Pembayaran Hasil Pemeriksaan	35,523,791.00	35,523,791.00	100.00				13,762,000.00		
1.01.05.1.4.12.	Penrm dari PihakKetiga yg bkn Perusahaan Daerah	203,200,000.00	203,200,000.00	100.00	200,000,000.00	172,485.00			3,892,420.00	
	- Kontrak Kerjasama de PT. Cakrawala Bupala Asri					203,200,000.00	101.60	382,700,000.00	304,800,000.00	79.64
1.01.05.1.4.13.	Bea Pertanahan	95,000,000.00	78,779,000.00	82.93	85,000,000.00	168,779,400.00	198.56	150,000,000.00	155,055,000.00	103.37
	a. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah					163,379,400.00				
	b. Ganti Patok Beton/Tanda Batas Persil					5,400,000.00				
1.01.05.1.4.14.	Bea Admn. Perusahaan	28,320,000.00	27,860,000.00	98.38	28,500,000.00	21,845,000.00	76.65	28,500,000.00	20,126,000.00	70.60
1.01.05.1.4.15.	1. KPPD (Ongkos Cetak Bioskop)				4,800,000.00	8,820,000.00	183.75	5,400,000.00	9,352,000.00	173.19
1.01.05.1.4.16.	2. Dinas Pengelolaan Pasar					1,000,000.00				
1.01.05.1.4.17.	3. Dishub (OC Parkir)									
1.01.05.1.4.18.	SIUJK	56,700,000.00	44,475,000.00	78.44	27,075,000.00	17,875,000.00	66.02	15,700,000.00	16,650,000.00	106.05
1.01.05.1.4.19.	Pendapatan Lain-lain	4,641,424,711.00	7,627,695,181.63	164.34		2,351,759,714.61				
1.01.05.1.4.20.	Pendapatan Lain-lain Poskeswan							4,000,000.00	6,098,700.00	152.47
1.0.0.2.	DANA PERIMBANGAN	185,333,797,889.24	187,968,763,862.24	101.42	238,766,313,000.00	253,512,781,343.07	106.18	252,390,201,000.00	269,967,630,200.69	106.96
1.0.0.2.1.	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	23,602,470,461.46	24,744,094,790.00	104.84	25,468,673,000.00	32,300,731,328.00	126.83	29,583,201,000.00	37,889,440,614.00	128.08
1.0.0.2.1.01.	Pos Bagi hasil Pajak	21,985,126,317.00	24,744,094,790.00	112.55	25,300,000,000.00	31,855,929,646.00	125.91	29,341,496,000.00	37,517,931,076.00	127.87
1.01.08.2.1.01.01.	Pajak Bumi dan Bangunan	10,226,621,143.00	10,919,471,367.00	106.77	12,541,495,000.00	13,488,889,379.00	107.55	12,541,496,000.00	16,980,061,288.00	135.39
	a. PBB									
	b. Pengembalian PBB Bag. Pemerintah Pusat									
	c. Pertambangan									
1.01.08.2.1.01.02.	Bea Perolehan Hak Ats Tanah dan Bangunan	5,258,504,174.00	5,492,182,876.00	104.44	5,258,504,000.00	7,031,468,452.00	133.72	5,800,000,000.00	12,523,201,694.00	215.92
1.01.05.2.1.01.03.	Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan	6,500,000,000.00	8,332,440,547.00	128.19	7,500,000,000.00	11,335,571,815.00	151.14	11,000,000,000.00	8,014,668,093.00	72.86
	Pajak Pph 21									
1.0.0.2.1.02.	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak SDA	808,672,672.24	350,156,672.24	43.30	158,673,000.00	444,801,682.00	280.33	241,705,000.00	371,509,689.00	153.70
1.01.05.2.1.02.1.	Provisi Sumber Daya Hutan	158,672,572.24	158,672,572.24	100.00	158,673,000.00	439,564,682.00	277.03	98,515,000.00	371,509,539.00	377.11
1.01.05.2.1.02.10.	Pemberian Hak Atas Tanah Negara	650,000,000.00	191,484,000.00	29.46		5,237,000.00				
	Sumber Daya Alam Perikanan							143,190,000.00		
1.0.0.2.2.	Pos Dana Alokasi Umum	162,540,000,000.00	162,874,512,500.00	100.21	196,100,000,000.00	196,100,000,000.00	100.00	197,787,000,000.00	197,787,000,000.00	100.00
1.01.05.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	162,540,000,000.00	162,874,512,500.00	100.21	196,100,000,000.00	196,100,000,000.00	100.00	197,787,000,000.00	197,787,000,000.00	100.00
1.0.0.2.3.	Pos Dana Alokasi Khusus									
1.01.05.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus dan Reboisasi				4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	100.00	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	100.00
	1. Infrastruktur									
	2. Kesehatan									
	3. Pendidikan									
1.0.0.2.4.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan	12,362,429,745.00	17,575,966,706.96	142.17	12,997,640,000.00	20,912,000,016.07	160.89	19,520,000,000.00	28,791,189,686.69	147.50
	dari Propinsi									
1.01.05.2.4.01.	Bagi Hasil Pajak Propinsi DIY	12,299,462,945.00	16,115,201,508.96	131.02	12,934,673,000.00	20,778,481,915.07	160.64	19,400,000,000.00	28,472,446,803.69	146.77
1.01.05.2.4.01.01.	Pajak Bea Balik Nama Kend. Bermotor-BBNKB	10,000,000,000.00	14,000,000,000.00	140.00	10,000,000,000.00	14,881,219,975.05	148.81	14,000,000,000.00	19,890,648,449.82	142.08
1.01.05.2.4.01.05.	Pajak bahan Bakar Kend. Bermotor	2,700,000,000.00	5,000,000,000.00	185.19	2,700,000,000.00	5,449,554,740.02	201.84	5,000,000,000.00	7,796,812,182.23	155.94
1.01.05.2.4.01.06.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	100,000,000.00	300,000,000.00	300.00	100,000,000.00	315,210,000.00	315.21	300,000,000.00	568,000,471.64	189.33
1.01.05.2.4.01.08.	Pemvisiban Pajak Bumi dan Bangunan	134,673,000.00	100,000,000.00	74.25	134,673,000.00	132,497,200.00	98.38	100,000,000.00	216,985,700.00	216.99
1.01.05.2.4.03.	Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi DIY									
1.01.05.2.4.03.01.	Pemvisihan Retribusi Propinsi	62,966,800.00	1,460,765,197.00	2,319.90	62,967,000.00	133,518,100.00	212.04	120,000,000.00	318,742,783.00	265.62
						133,518,100.00	212.04	120,000,000.00	318,742,783.00	265.62
1.0.0.3.	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	17,459,217,745.00	23,077,480,766.96	132.18	7,841,710,000.00	16,496,466,000.00	210.37	18,342,100,000.00	19,770,829,773.00	107.79
1.01.05.3.1.02.	Bantuan Dana Kontijensi-Penyembangan dari Pemrnt.	5,096,788,000.00	5,501,514,050.00	107.94	7,841,710,000.00	16,496,466,000.00	210.37	5,043,100,000.00	6,471,829,773.00	128.33
1.01.05.3.1.03.	Dana Penyesuaian Ad Hoc		13,299,000,000.00					13,299,000,000.00	13,299,000,000.00	100.00
	JUMLAH KESELURUHAN	252,478,329,044.41	267,423,704,177.09	105.92	303,420,033,000.00	338,630,761,654.14	111.60	341,144,882,000.00	369,645,879,034.61	108.35

Yogyakarta, Mei 2005

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Yogyakarta

Dra. Rr. Titik Sulastri

LAMPIRAN 4

Folio : 20
BAB II. BELANJA RUTIN

Bagian/Pos/ Pasal	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Telah direalisir	
			Jumlah	Berlebih (Berkurang)
1	2	3	4	5
2,2,4,	LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL KOTA YOGYAKARTA	4,943,408,565.00	4,518,901,605.00	(424,506,960.00)
	Belanja Pegawai (DAU + PAD)	1,369,183,887.00	1,318,418,569.00	(50,765,318.00)
2.2.4.1001	Gaji dan TunjanagnLainnya (DAU)	1,332,295,887.00	1,282,286,569.00	(50,009,318.00)
1003	Honorarium (PAD)	30,888,000.00	30,214,000.00	(674,000.00)
1004	Uang Lembur (PAD)	6,000,000.00	5,918,000.00	(82,000.00)
	Belanja Barang (PAD)	306,156,813.00	271,468,880.00	(34,687,933.00)
2.2.4.1011	Ongkos Kantor	230,361,813.00	203,076,880.00	(27,284,933.00)
1012	Pembelian Inventaris Kantor			
1013	Biaya Pendidikan	24,000,000.00	18,200,000.00	(5,800,000.00)
1016	Pembelian Pakaian Dinas	51,195,000.00	49,832,000.00	(1,363,000.00)
1030	Biaya Pengadaan Bahan Pencegah Kebakaran	600,000.00	360,000.00	(240,000.00)
	Belanja Operasi & Pemeliharaan (PAD)	113,538,869.00	88,023,550.00	(25,515,319.00)
2.2.4.1051	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	11,500,869.00	7,650,825.00	(3,850,044.00)
1053	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	47,927,000.00	41,908,250.00	(6,018,750.00)
1054	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	54,111,000.00	38,464,475.00	(15,646,525.00)
	Belanja Perjalanan Dinas (PAD+PBB)	1,380,668,210.00	1,168,462,325.00	(212,205,885.00)
2.2.4.1071	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000.00	6,450,000.00	(3,550,000.00)
1072	Biaya Perjalanan Dinas Tetap	1,370,668,210.00	1,162,011,825.00	(208,656,385.00)
	Belanja Lain-Lain (PAD)	1,773,860,786.00	1,672,528,281.00	(101,332,505.00)
2.2.4.1081	Uang Perangsan /Insentip	1,603,760,786.00	1,559,429,081.00	(44,331,705.00)
1085	Biaya Propaganda, Penerangan dan Pameran serta Dokumentasi	170,100.00	113,099,200.00	112,929,100.00
1091	Biaya Pemungutan PBB			

LAMPIRAN 5
REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

KEGIATAN : OPTIMALISASI PAJAK HOTEL
UNIT KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2003

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		%	KETERANGAN
			JUMLAH	BERLEBIH (BERKURANG)		
	BELANJA PEGAWAI	734,375,431.00	732,996,965.00	(1,378,466.00)	99.81	Sesuai dengan kebutuhan
2 01 08 21 01 01	Honorarium Tim	1,375,000.00	1,375,000.00	-	100	
2 01 08 21 01 03	Honor Upah Harian	52,360,000.00	50,984,000.00	(1,376,000.00)	97.37	
2 01 08 21 02 02	Uang Lembur Harian	3,854,000.00	3,852,000.00	(2,000.00)	99.95	
2 01 08 21 03 01	Insentif Pajak	592,474,500.00	250,481,775.00	(341,992,725.00)	42.28	
2 01 08 21 03 02	Kekrg. Insentif P. Hotel 2002	82,288,619.00	82,288,619.00	-	100	
2 01 08 21 03 02	Kekrg. Insentif P. ABT Th. 2002	2,023,312.00	2,023,312.00	-	100	
	BELANJA BARANG	22,040,000.00	14,241,800.00	(7,798,200.00)	64.62	
2 01 08 22 01 05	Biaya Alat Tulis	305,000.00	305,000.00	-	100	
2 01 08 22 05 01	Biaya Makanan & Minuman	21,135,000.00	13,722,800.00	(7,412,200.00)	64.93	
2 01 08 22 05 02	U. Rapat Koordinasi	600,000.00	214,000.00	(386,000.00)	35.67	
	BELANJA PERJALANAN	50,050,000.00	45,305,000.00	(4,745,000.00)	90.52	
2 01 08 23 01 01	Bi. Perjalanan Dinas dlm Daerah	50,050,000.00	45,305,000.00	(4,745,000.00)	90.52	
	JUMLAH	806,465,431.00	792,543,765.00	(13,921,666.00)	98.27	

KEPALA UNIT KERJA

Dra. RR. Titik Sulastri
NIP. 490 026 222

PEMEGANG KAS

Khasbiyah Ekowijiati
NIP. 490 025 006

LAMPIRAN 3

Folio : 22
BAB II. BELANJA RUTIN

Bagian/Pos/ Pasal	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Telah direalisir	
			Jumlah	Berlebih (Berkurang)
1	2	3	4	5
2.2.4.	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH	5,067,193,527.00	5,190,160,243.00	122,966,716.00
	Belanja Pegawai	3,119,099,077.00	3,366,330,960.00	247,231,883.00
2.2.4.1001.	Gaji dan Tunjangan Lainnya	1,150,858,428.00	1,328,796,181.00	177,937,753.00
1002	Tunjangan Beras	80,540,200.00	97,294,400.00	16,754,200.00
1003	Honorarium	57,000,000.00	48,450,000.00	(8,550,000.00)
1004	Uang Lembur	6,000,000.00	5,995,000.00	(5,000.00)
1005	Upah Pekerja Harian Tetap	4,144,500.00	1,768,500.00	(2,376,000.00)
1007	Uang Perangsang/Insentip	1,802,415,949.00	1,867,066,354.00	64,650,405.00
1009	Biaya Persidangan	18,140,000.00	16,960,525.00	(1,179,475.00)
	Belanja Barang	586,734,750.00	547,836,838.00	(38,897,912.00)
2.2.4.1011	Ongkos Kantor	376,234,750.00	372,033,128.00	(4,201,622.00)
1012	Pembelian Inventaris Kantor	24,000,000.00	18,566,250.00	(5,433,750.00)
1013	Biaya Pendidikan	20,000,000.00	4,030,000.00	(15,970,000.00)
1016	Pembelian Pakaian Dinas	39,400,000.00	34,245,050.00	(5,154,950.00)
1030	Biaya Pengadaan Bahan Pencegah Kebakaran	600,000.00	360,000.00	(240,000.00)
1045	Biaya Propaganda, Penerangan dan Pameran serta Dokumentasi	126,500,000.00	118,602,410.00	(7,897,590.00)
	Belanja Pemeliharaan	111,092,250.00	97,757,210.00	(13,335,040.00)
2.2.4.1051	Baiaya Pemeliharaan GedungKantor	17,260,000.00	17,231,250.00	(28,750.00)
1053	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	46,332,250.00	43,901,560.00	(2,430,690.00)
1054	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	47,500,000.00	36,624,400.00	(10,875,600.00)
	Biaya Perjalanan Dinas	1,250,267,450.00	1,178,235,235.00	(72,032,215.00)
2.2.4.1071	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,500,000.00	6,288,500.00	(211,500.00)
1072	Biaya Perjalanan Dinas Tetap	1,243,767,450.00	1,172,946,735.00	(70,820,715.00)

Folio : 23
BAB II. BELANJA RUTIN

Bagian/Pos/ Pasal	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Telah direalisir	
			Jumlah	Berlebih (Berkurang)
1	2	3	4	5
2,2,5,	LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL KOTA YOGYAKARTA	715,363,190.00	785,658,074.00	70,294,884.00
	Belanja Pegawai	621,222,180.00	696,688,790.00	75,466,610.00
2.2.5.1001	Gaji dan Tunjanagn Lainnya	584,485,380.00	653,049,990.00	68,564,610.00
1002	Tunjangan Beras	35,128,800.00	42,030,800.00	6,902,000.00
1004	Uang Lembur	1,608,000.00	1,608,000.00	0.00
	Belanja Barang	10,250,000.00	9,898,774.00	(351,226.00)
2.2.5.1011	Ongkos Kantor	9,650,000.00	9,298,774.00	(351,226.00)
1014	Biaya Perpustakaan	600,000.00	600,000.00	0.00
	Belanja Pemeliharaan	11,628,000.00	11,615,500.00	(12,500.00)
2.2.5.1053	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	11,628,000.00	11,615,500.00	(12,500.00)
	Biaya Perjalanan Dinas	72,263,000.00	67,455,000.00	(4,808,000.00)
2.2.5.1072	Biaya Perjalanan Dinas Tetap	72,263,000.00	67,455,000.00	(4,808,000.00)

REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

KEGIATAN : OPTIMALISASI PAJAK RESTORAN
UNIT KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2003

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		%	KETERANGAN
			JUMLAH	BERLEBIH (BERKURANG)		
	BELANJA PEGAWAI	308,806,073.00	307,926,048.00	(880,025.00)	99.72	Sesuai dengan kebutuhan
2 01 08 21 01 01	Honorarium Tim	1,225,000.00	1,225,000.00	-	100	
2 01 08 21 01 03	Honor Upah Harian	30,600,000.00	29,726,000.00	(874,000.00)	97.14	
2 01 08 21 02 02	Uang Lembur Harian	3,854,000.00	3,848,000.00	(6,000.00)	99.84	
2 01 08 21 03 01	Insentif Pajak	250,481,800.00	250,481,775.00	(25.00)	100	
2 01 08 21 03 02	Kekrg. Insentif P. Restoran 2002	22,645,273.00	22,645,273.00	-	100	
2 01 08 21 03 02	Kekrg. Insentif P. ABT Th. 2002					
	BELANJA BARANG	8,988,000.00	8,384,200.00	(603,800.00)	93.28	
2 01 08 22 01 05	Biaya Alat Tulis	456,000.00	456,000.00	-	100	
2 01 08 22 05 01	Biaya Makanan & Minuman	7,932,000.00	7,494,200.00	(437,800.00)	94.48	
2 01 08 22 05 02	U. Rapat Koordinasi	600,000.00	434,000.00	(166,000.00)	72.33	
	BELANJA PERJALANAN	29,250,000.00	26,270,000.00	(2,980,000.00)	89.81	
2 01 08 23 01 01	Bi. Perjalanan Dinas dlm Daerah	29,250,000.00	26,270,000.00	(2,980,000.00)	89.81	
	JUMLAH	347,044,073.00	342,580,248.00	(4,463,825.00)	98.71	

KEPALA UNIT KERJA

Dra. RR. Titik Sulastri
NIP. 490 026 222

PEMEGANG KAS

Khasbiyah Ekowijiati
NIP. 490 025 006

REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

KEGIATAN : OPTIMALISASI PAJAK REKLAME
UNIT KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2003

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		%	KETERANGAN
			JUMLAH	BERLEBIH (BERKURANG)		
	BELANJA PEGAWAI	148,879,071.00	145,339,068.00	(3,540,003.00)	97.62	Sesuai dengan kebutuhan
2 01 08 21 01 01	Honorarium Tim	1,825,000.00	1,825,000.00	-	100	
2 01 08 21 01 02	Honor Upah Bulanan	26,083,000.00	26,083,000.00	-	100	
2 01 08 21 01 03	Honor Upah Harian	30,800,000.00	3,852,000.00	(26,948,000.00)	12.51	
2 01 08 21 02 02	Uang Lembur Harian	3,854,000.00	3,846,000.00	(8,000.00)	99.79	
2 01 08 21 03 01	Insentif Pajak	82,986,950.00	82,986,947.00	(3.00)	100	
2 01 08 21 03 02	Kekrg. Insentif P. Reklame 2002	4,530,121.00	4,530,121.00	-	100	
2 01 08 21 03 02	Kekrg. Insentif P. ABT Th. 2002	-	-	-	-	
	BELANJA BARANG	31,241,000.00	13,811,650.00	(17,429,350.00)	44.21	
2 01 08 22 01 05	Biaya Alat Tulis	650,000.00	650,000.00		100	
2 01 08 22 04	Biaya Sewa	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100	
2 01 08 22 05 01	Biaya Makanan & Minuman	20,937,000.00	9,842,650.00	(11,094,350.00)	47.01	
2 01 08 22 05 02	U. Rapat Koordinasi	8,154,000.00	1,819,000.00	(6,335,000.00)	22.31	
	BELANJA PERJALANAN	27,300,000.00	21,527,500.00	(5,772,500.00)	78.86	
2 01 08 23 01 01	Bi. Perjalanan Dinas dlm Daerah	27,300,000.00	21,527,500.00	(5,772,500.00)	78.86	
	JUMLAH	207,420,071.00	180,678,218.00	(26,741,853.00)	87.11	

KEPALA UNIT KERJA

Dra. RR. Titik Sulastri
NIP. 490 026 222

PEMEGANG KAS

Khasbiyah Ekowijiati
NIP. 490 025 006

REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

KEGIATAN : OPTIMALISASI PAJAK HIBURAN
UNIT KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2003

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		%	KETERANGAN
			JUMLAH	BERLEBIH (BERKURANG)		
	BELANJA PEGAWAI	122,315,565.00	121,484,210.00	(831,355.00)	99.32	Sesuai dengan kebutuhan
2 01 08 21 01 01	Honorarium Tim	850,000.00	850,000.00	-	100	
2 01 08 21 01 03	Honor Upah Harian	29,400,000.00	28,588,000.00	(812,000.00)	97.24	
2 01 08 21 02 02	Uang Lembur Harian	3,854,000.00	3,835,000.00	(19,000.00)	99.51	
2 01 08 21 03 01	Insentif Pajak Hiburan	83,380,050.00	83,379,695.00	(355.00)	100	
2 01 08 21 03 02	Kekrg. Insentif P. Hiburan 2002	4,831,515.00	4,831,515.00	-	100	
2 01 08 21 03 02	Kekrg. Insentif P. ABT Th. 2002	-	-	-	-	
	BELANJA BARANG	10,358,000.00	7,436,250.00	(2,921,750.00)	71.79	
2 01 08 22 01 05	Biaya Alat Tulis	456,000.00	456,000.00	-	100	
2 01 08 22 05 01	Biaya Makanan & Minuman	8,622,000.00	6,067,250.00	(2,554,750.00)	70.37	
2 01 08 22 05 02	U. Rapat Koordinasi	1,380,000.00	913,000.00	(467,000.00)	66.16	
	BELANJA PERJALANAN	32,850,000.00	27,380,000.00	(5,470,000.00)	83.35	
2 01 08 23 01 01	Bi. Perjalanan Dinas dlm Daerah	32,850,000.00	27,380,000.00	(5,470,000.00)	83.35	
	JUMLAH	165,523,565.00	156,300,460.00	(9,223,105.00)	94.43	

KEPALA UNIT KERJA

Dra. RR. Titik Sulastri
NIP. 490 026 222

PEMEGANG KAS

Khasbiyah Ekowijiati
NIP. 490 025 006

REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

KEGIATAN : OPTIMALISASI PAJAK PARKIR
UNIT KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2003

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		%	KETERANGAN
			JUMLAH	BERLEBIH (BERKURANG)		
	BELANJA PEGAWAI	23,705,000.00	23,494,490.00	(210,510.00)	99.11	Sesuai dengan kebutuhan
2 01 08 21 01 01	Honorarium Tim	400,000.00	400,000.00	-	100	
2 01 08 21 01 02	Honor Upah Bulanan	9,325,000.00	9,325,000.00	-	100	
2 01 08 21 01 03	Honor Upah Harian	7,480,000.00	7,276,000.00	(204,000.00)	97.27	
2 01 08 21 02 02	Uang Lembur Harian	-	-	-	-	
2 01 08 21 03 01	Insentif Pajak	6,500,000.00	6,493,490.00	(6,510.00)	100	
2 01 08 21 03 02	Kekrg. Insentif 2002	-	-	-	-	
2 01 08 21 03 02	Kekrg. Insentif P. ABT Th. 2002	-	-	-	-	
	BELANJA BARANG	14,448,000.00	12,606,100.00	(1,841,900.00)	87.25	
2 01 08 22 01 05	Biaya Alat Tulis	200,000.00	200,000.00		100	
2 01 08 22 02 01	B. Jasa Tenaga Kerja Non Peg.	-	-	-	-	
2 01 08 22 05 01	Biaya Makanan & Minuman	11,656,000.00	10,980,100.00	(675,900.00)	94.20	
2 01 08 22 05 02	U. Rapat Koordinasi	2,592,000.00	1,426,000.00	(1,166,000.00)	55.02	
	BELANJA PERJALANAN	7,150,000.00	6,447,500.00	(702,500.00)	90.17	
2 01 08 23 01 01	Bi. Perjalanan Dinas dlm Daerah	7,150,000.00	6,447,500.00	(702,500.00)	90.17	
	JUMLAH	45,303,000.00	42,548,090.00	(2,754,910.00)	93.92	

KEPALA UNIT KERJA

Dra. RR. Titik Sulastri
NIP. 490 026 222

PEMEGANG KAS

Khasbiyah Ekowijiati
NIP. 490 025 006

REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

KEGIATAN : OPTIMALISASI PAJAK PENERANGAN JALAN
UNIT KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2003

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		%	KETERANGAN
			JUMLAH	BERLEBIH (BERKURANG)		
	BELANJA PEGAWAI					Sesuai dengan kebutuhan
	Honorarium Tim	9,600,000.00	9,600,000.00	-	100	
	Insentif	636,127,260.00	590,459,433.00	(45,667,827.00)	93	
	BELANJA BARANG & JASA					
	Biaya Alat Tulis	200,000.00	200,000.00	-	100	
	B. Jasa Tenaga Kerja Non Peg.	-	-	-	-	
	Biaya Makanan & Minuman	2,435,000.00	1,573,000.00	(862,000.00)	64.60	
	U. Sidang	3,570,000.00	1,861,000.00	(1,709,000.00)	52.13	
	BELANJA PERJALANAN					
	JUMLAH	651,932,260.00	603,693,433.00	(48,238,827.00)		

KEPALA UNIT KERJA

Dra. RR. Titik Sulastri
NIP. 490 026 222

PEMEGANG KAS

Khasbiyah Ekowijiati
NIP. 490 025 006

LAMPIRAN 6
REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

KEGIATAN : OPTIMALISASI PAJAK HOTEL
UNIT KERJA : KPPD KOTA YOGYAKARTA
TAHUN : 2004

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		%	KETERANGAN
			JUMLAH	BERLEBIH (BERKURANG)		
	BELANJA PEGAWAI					Sesuai dengan kebutuhan
2 01 08 21 01 01 1	Honorarium Tim	26,977,500.00	21,882,500.00	(5,095,000.00)	81.11	
2 01 08 21 02 02 1	Insentif	7,200,000.00	7,067,000.00	(133,000.00)	98.15	
	BELANJA BARANG & JASA					
2 01 08 22 01 05 1	Biaya Alat Tulis	750,000.00	726,750.00	(23,250.00)	96.90	
2 01 08 22 05 01 1	Biaya Makanan & Minuman	82,615,000.00	70,097,950.00	(12,517,050.00)	84.85	
2 01 08 22 05 02 1	U. Sidang	5,430,000.00	2,771,000.00	(2,659,000.00)	51.03	
	BELANJA PERJALANAN					
2 01 08 23 01 01 1	Bi. Perjalanan dalam Daerah	117,000,000.00	100,350,000.00	(16,650,000.00)	85.77	
	JUMLAH	239,972,500.00	202,895,200.00	(37,077,300.00)		

YOGYAKARTA,

PIMPINAN KEGIATAN,

TUTY ARYANI, SH
NIP. 490 024 670

PEMEGANG KAS,

KHASBIYAH EKOWIJIATI
NIP. 490 025 006

MENGETAHUI,
KEPALA UNIT KERJA

HERU PRIA WARJAKA, SE
NIP. 490 026 186

REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

KEGIATAN : OPTIMALISASI PAJAK RESTORAN
UNIT KERJA : KPPD KOTA YOGYAKARTA
TAHUN : 2004

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		%	KETERANGAN
			JUMLAH	BERLEBIH (BERKURANG)		
	BELANJA PEGAWAI					Sesuai dengan kebutuhan
2 01 08 21 01 01 1	Honorarium Tim	26,977,500.00	21,697,500.00	(5,280,000.00)	80.43	
2 01 08 21 02 02 1	Insentif	6,720,000.00	6,168,000.00	(552,000.00)	91.79	
	BELANJA BARANG & JASA					
2 01 08 22 01 05 1	Biaya Alat Tulis	750,000.00	719,750.00	(30,250.00)	95.97	
2 01 08 22 05 01 1	Biaya Makanan & Minuman	83,635,000.00	74,848,200.00	(8,786,800.00)	89.49	
2 01 08 22 05 02 1	U. Sidang	9,150,000.00	4,026,000.00	(5,124,000.00)	44.00	
	BELANJA PERJALANAN					
2 01 08 23 01 01 1	Bi. Perjalanan dalam Daerah	115,740,000.00	105,277,500.00	(10,462,500.00)	90.96	
	JUMLAH	242,972,500.00	212,736,950.00	(30,235,550.00)		

YOGYAKARTA,
PEMEGANG KAS,

KHASBIYAH EKOWIJIATI
NIP. 490 025 006

PIMPINAN KEGIATAN,

TUTY ARYANI, SH
NIP. 490 024 670

MENGETAHUI,
KEPALA UNIT KERJA

HERU PRIA WARJAKA, SE
NIP. 490 026 186

REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

KEGIATAN : OPTIMALISASI PAJAK REKLAME
UNIT KERJA : KPPD KOTA YOGYAKARTA
TAHUN : 2004

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		%	KETERANGAN
			JUMLAH	BERLEBIH (BERKURANG)		
	BELANJA PEGAWAI					Sesuai dengan kebutuhan
2 01 08 21 01 01 1	Honorarium Tim	31,430,000.00	30,690,000.00	(740,000.00)	97.65	
2 01 08 21 02 02 1	Insentif	9,460,000.00	8,681,000.00	(779,000.00)	91.77	
	BELANJA BARANG & JASA					
2 01 08 22 01 05 1	Biaya Alat Tulis	980,000.00	737,500.00	(242,500.00)	75.26	
2 01 08 22 01 08 1	Bi. Bahan dan Alat Kerja	5,400,000.00	4,230,000.00	(1,170,000.00)	78.33	
2 01 08 22 02 01 1	Bi. Jasa Tenaga Kerja Non Peg.	10,000,000.00	6,900,000.00	(3,100,000.00)	69.00	
2 01 08 22 04 01 1	Bi. Sewa Tempat	1,000,000.00	750,000.00	(250,000.00)	75.00	
2 01 08 22 05 01 1	Biaya Makanan & Minuman	83,094,000.00	64,352,000.00	(18,742,000.00)	77.44	
2 01 08 22 05 02 1	U. Sidang	15,840,000.00	6,151,000.00	(9,689,000.00)	38.83	
	BELANJA PERJALANAN					
2 01 08 23 01 01 1	Bi. Perjalanan dalam Daerah	108,630,000.00	88,980,000.00	(19,650,000.00)	81.91	
	JUMLAH	265,834,000.00	211,471,500.00	(54,362,500.00)		

YOGYAKARTA,
PEMEGANG KAS,

KHASBIYAH EKOWIJIATI
NIP. 490 025 006

PIMPINAN KEGIATAN,

TUTY ARYANI, SH
NIP. 490 024 670

MENGETAHUI,
KEPALA UNIT KERJA

HERU PRIA WARJAKA, SE
NIP. 490 026 186

REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

KEGIATAN : OPTIMALISASI PAJAK HIBURAN
UNIT KERJA : KPPD KOTA YOGYAKARTA
TAHUN : 2004

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		%	KETERANGAN
			JUMLAH	BERLEBIH (BERKURANG)		
	BELANJA PEGAWAI					Sesuai dengan kebutuhan
2 01 08 21 01 01 1	Honorarium Tim	17,300,000.00	16,990,000.00	(310,000.00)	98.21	
2 01 08 21 02 02 1	Uang Lembur Harian	4,800,000.00	4,728,000.00	(72,000.00)	98.50	
	BELANJA BARANG & JASA					
2 01 08 22 01 05 1	Biaya Alat Tulis	1,200,000.00	1,148,400.00	(51,600.00)	95.70	
2 01 08 22 05 01 1	Biaya Makanan & Minuman	71,540,000.00	62,123,000.00	(9,417,000.00)	86.84	
2 01 08 22 05 02 1	U. Sidang	3,300,000.00	1,286,000.00	(2,014,000.00)	38.97	
	BELANJA PERJALANAN					
2 01 08 23 01 01 1	Bi. Perjalanan dalam Daerah	102,540,000.00	91,342,500.00	(11,197,500.00)	89.08	
	JUMLAH	200,680,000.00	177,617,900.00	(23,062,100.00)		

YOGYAKARTA,
PEMEGANG KAS,

KHASBIYAH EKOWIJIATI
NIP. 490 025 006

PIMPINAN KEGIATAN,

TUTY ARYANI, SH
NIP. 490 024 670

MENGETAHUI,
KEPALA UNIT KERJA

HERU PRIA WARJAKA, SE
NIP. 490 026 186

REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

KEGIATAN : OPTIMALISASI PAJAK PARKIR
UNIT KERJA : KPPD KOTA YOGYAKARTA
TAHUN : 2004

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		%	KETERANGAN
			JUMLAH	BERLEBIH (BERKURANG)		
	BELANJA PEGAWAI					Sesuai dengan kebutuhan
2 01 08 21 01 01 1	Honorarium Tim	3,120,000.00	3,120,000.00	-	100.00	
2 01 08 21 02 02 1	Insentif	2,880,000.00	2,874,000.00	(6,000.00)	99.79	
	BELANJA BARANG & JASA					
2 01 08 22 01 05 1	Biaya Alat Tulis	500,000.00	455,625.00	(44,375.00)	91.13	
2 01 08 22 05 01 1	Biaya Makanan & Minuman	29,970,000.00	27,246,900.00	(2,723,100.00)	90.91	
2 01 08 22 05 02 1	U. Sidang	2,880,000.00	1,461,000.00	(1,419,000.00)	50.73	
	BELANJA PERJALANAN					
2 01 08 23 01 01 1	Bi. Perjalanan dalam Daerah	40,500,000.00	39,262,500.00	(1,237,500.00)	96.94	
	JUMLAH	79,850,000.00	74,420,025.00	(5,429,975.00)		

YOGYAKARTA,

PIMPINAN KEGIATAN,

TUTY ARYANI, SH
NIP. 490 024 670

PEMEGANG KAS,

KHASBIYAH EKOWIJIATI
NIP. 490 025 006

MENGETAHUI,
KEPALA UNIT KERJA

HERU PRIA WARJAKA, SE
NIP. 490 026 186

REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

KEGIATAN : OPTIMALISASI PAJAK PENERANGAN JALAN
UNIT KERJA : KPPD KOTA YOGYAKARTA
TAHUN : 2004

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		%	KETERANGAN
			JUMLAH	BERLEBIH (BERKURANG)		
	BELANJA PEGAWAI					Sesuai dengan kebutuhan
	Honorarium Tim	8,660,000.00	8,660,000.00	-	100	
	BELANJA BARANG & JASA					
	Biaya Alat Tulis	200,000.00	192,000.00	(8,000.00)	96	
	B. Jasa Tenaga Kerja Non Peg.	60,000,000.00	50,568,650.00	(9,431,350.00)	-	
	Biaya Makanan & Minuman	3,510,000.00	1,560,200.00	(1,949,800.00)	44.45	
	U. Sidang	3,780,000.00	1,792,000.00	(1,988,000.00)	47.41	
	BELANJA PERJALANAN					
	JUMLAH	76,150,000.00	62,772,850.00	(13,377,150.00)		

YOGYAKARTA,

PIMPINAN KEGIATAN,

TUTY ARYANI, SH
NIP. 490 024 670

PEMEGANG KAS,

KHASBIYAH EKOWIJIATI
NIP. 490 025 006

MENGETAHUI,
KEPALA UNIT KERJA

HERU PRIA WARJAKA, SE
NIP. 490 026 186

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/084

a Surat : Dari Dekan Fakulas Ekonomi - UII Yogyakarta

Nomor : 015/DEK/10/Bag.Um/I/2006Tanggal : 12/01/2006

at : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukkan Pendataan / Penelitian

2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN /PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepada

Nama	:	GINANJAR DHANY WICAKSONO NO MHS / NIM : 02312146
Pekerjaan	:	Mahasiswa Fak. Ekonomi - UII
Alamat	:	Condong Catur, Depok, Sleman
Penanggungjawab	:	Mahmudi, SE, M.Si,Ak
Keperluan	:	Melakukan Observasi Penelitian denga judul: ANALISIS EFEKTIVITAS SERTA EFISIENSI PAJAK DAN RETRIBUSI KOTA YOGYAKARTA DALAM ERA OTONOMI DAERAH

esponden : Kota Yogyakarta

: 19/01/2006 Sampai 19/04/2006

: Proposal dan Daftar Pertanyaan

Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Dikeluarkan di : Yogyakrta
Pada Tanggal : 19/01/2006
A.n. Walikota Yogyakarta
PLT. Kepala Dinas Perizinan

Dra. MK. PONTJOSIWI W.
NIP. 010165621

Tanda tangan
Pemegang Izin

GINANJAR DHANY WICAKSONO

Tembusan Kepada Yth. :
kota Yogyakarta(sebagai laporan)
BAPEDA Prop. DIY
BPKD Kota Yogyakarta
KPPD Kota Yogyakarta
BPS Kota Yogyakarta
ip.
Bag. Perekonomian dan PAD Kota Yk.